

Dr. Baeti Rohman, M.A,

Al-Qur'an dan Civil Society

*Kecerdasan Kewargaan
Perspektif Al-Qur'an*



Dr. Baeti Rohman, M.A,

Al-Qur'an dan Civil Society

*Kecerdasan Kewargaan
Perspektif Al-Qur'an*



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Qur'an dan Civil Society:

Kecerdasan Kewargaan Perspektif Al-Qur'an

© Dr. Baeti Rohman, M.A, 2020

Editor Ejaan : Muhamad Ibtissam Han

Desain Sampul : Muhamad Ibtissam Han

Layout : Jamil Abdul Aziz

Cetakan I, Juli 2020

Vi+286 halaman, 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-92426-1-9

1. Islam dan Kebangsaan

I. Judul.

Penerbit:



Tarbiyah Press

Institut PTIQ Jakarta

Jl. Batan I No.2 Lebakbulus,
Cilandak, Jakarta Selatan, 12240

Indonesia

Tlp. +6221-7690901

e-Mail: tarbiyah@ptiq.ac.id

PRAKATA

Untuk menjadi negara yang maju tentu saja perlu dukungan dan partisipasi dari berbagai elemen. Elemen yang paling utama untuk mewujudkan suatu negara yang bersih, bagus, dan tertata (*good and clean governance*) tentu saja adalah adanya pendidikan yang baik (*good education*) yang kemudian melahirkan warga yang kritis, jujur, dan cerdas atau dengan kata lain tercipta suatu kondisi masyarakat yang memiliki kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*).

Keterlibatan warga dalam pembangunan suatu bangsa dan negara haruslah dibarengi dengan pemahaman yang luas, toleran, demokratis, dan kompetitif. Warga negara bukanlah objek suatu pemerintahan, akan tetapi subjek perubahan dari sebuah pemerintahan. Untuk menjadi subjek atau pelaku perubahan, setiap warga negara perlu memahami konsep dasar bernegara yang baik. Selain itu, setiap warga negara perlu memiliki kesadaran akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai dan pengetahuan yang dimilikinya.

Kehadiran buku yang dipegang oleh pembaca ini merupakan sebuah upaya untuk membangun suatu kesadaran kewargaan yang berbudaya dan berwawasan luas. Buku ini juga saya harapkan dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi keberlangsungan bangsa dan masyarakat yang berkeadaban.

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi rujukan serta inspirasi bagi siapa saja (akademisi, aktivis, politisi, dll) yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan bangsa Indonesia tercinta. Akhir kata guna penyempurnaan buku ini, kritik dan saran dari pembaca sangat penulis nantikan.

Jakarta, Juli 2020

Dr. Bacti Rohman, M.A.

PEDOMAN LITERASI

b = ب	z = ز	f = ف
t = ت	s = س	q = ق
ts = ث	sy = ش	k = ك
j = ج	sh = ص	l = ل
h = ح	dh = ض	m = م
kh = خ	th = ط	n = ن
d = د	zh = ظ	h = ه
dz = ذ	' = ع	w = و
r = ر	gh = غ	y = ي

Pendek: a = اَ ; i = اِ ; u = اُ

Panjang: ā = آ ; ī = إ ; ū = أُ

Diftong: ay = آيَ ; aw = أَوْ ; iyy = إِيَّ ; uww = أُوَّ

Untuk transliterasi bahasa Arab yang di dalamnya terdapat kata dengan huruf شمسية ال dan القمرية ال ke dalam tulisan Latin, penulis tidak membedakan transliterasinya. Semua transliterasi bahasa Arab ke dalam bahasa Latin dalam buku ini menggunakan القمرية ال, contoh: البيت ditransliterasikan menjadi *al-bait*, dan الشكر ditransliterasikan menjadi *al-syukr*.

DAFTAR ISI

Prakata	__ ii
Pedoman Literasi	__ iii
Daftar Isi	__ iv
Bab I: Pendahuluan	__ 1
Bab II: Kecerdasan Kewargaan	__ 13
Bab III: Multikulturalisme dan Kecerdasan Kewargaan	__ 41
Bab IV: Isyarat Al-Qur'an Tentang Kecerdasan Kewargaan	__ 85
Bab V: Kecerdasan Kewargaan Dan Masyarakat Ideal	__ 127
Bab VI: Aplikasi Kecerdasan Kewargaan	__ 195
Bab VII: Penutup	__ 259
Bibliografi	__ 263
Tentang Penulis	__ 283



BAB I: PENDAHULUAN

Sejak dikandung dalam rahim ibu, kemudian terlahir dan menjalani proses kehidupan sampai kematiannya, manusia tidak terlepas dari ketergantungannya dengan manusia lain. Intensitas interaksi sosial dengan persoalan yang dihadapi “memaksa” manusia untuk terus mengasah dan meningkatkan kecerdasannya. Karena hakikatnya, manusia secara individu maupun kelompok memiliki naluri untuk melakukan perubahan.

Masyarakat dalam sistem sosial selalu mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kecil sampai pada taraf yang sangat besar sehingga berdampak pengaruh yang sangat besar pula bagi aspek perilaku dan pola pikir individu.¹ Perubahan itu menandai kecerdasan masyarakat selalu mengadaptasi diri dalam menyikapi lingkungannya. Sekelompok manusia yang hidup berada dalam sebuah bangsa atau negara yang saling terikat dengan hubungan timbal balik suatu hak dan kewajiban disebut sebagai warga negara.

¹ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.1

Dalam konteks Indonesia banyak keunggulan yang dimiliki. Selain sumber daya alam yang melimpah, Indonesia salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia tentu akan lebih mudah mendapatkan sumber daya manusia yang unggul, sehingga memiliki kesempatan beberapa langkah lebih cepat dibanding negara-negara dengan jumlah penduduk di bawahnya dalam melakukan perubahan. Menurut Yudi Latif, manusia terdiri atas dua bagian: kedirian privat (*private self*) yang bersifat personal dan khas serta kedirian publik (*public self*) yang melibatkan relasi sosial. Keduanya bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Problem Indonesia tidak bersumber dari kecerdasan diri privat, karena secara *intelligence quotient* (IQ) manusia Indonesia bukanlah kelompok manusia dengan defisit kepintaran. Tandanya bisa dilihat dari berbagai olimpiade internasional di bidang matematika, fisika, dan kimia. Selain mampu bersaing dengan peserta dari negara terpandang, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, pelajar-pelajar Indonesia menempati posisi predikat juara umum. Dalam kecerdasan spiritual juga relatif kuat. Manusia Indonesia pada umumnya bersifat "religius". Ukuran religiusitas dapat dilihat dari jumlah rumah ibadah yang terus bertambah, peningkatan jemaah calon haji dan umrah melambung; serta majelis zikir, penghayat tarekat, yoga, dan ajaran spiritualitas lain menjamur.² Intinya, predikat juara asah otak dan peningkatan atribut ekspresi keagamaan nyatanya belum mengubah secara signifikan terhadap kecerdasan kewargaan.

Lebih lanjut Yudi Latif menyatakan, sisi terlemah manusia Indonesia justru mencolok pada aspek kedirian bersifat publik. Hal ini ditandai misalnya dari bagaimana orang berlatar pribadi baik dengan mudah hanyut dalam arus keburukan begitu terjun ke politik. Demikian juga dengan institusi atau organisasi publik mengalami dekadensi. Seperti partai politik sakit, lembaga perwakilan sakit, birokrasi sakit, aparat penegak hukum dan keamanan-pertahanan sakit, bahkan organisasi keagamaan berskala besar pun mulai menunjukkan gejala sakit. Gejala-gejala tersebut mencerminkan kelalaian bangsa Indonesia dalam mengembangkan "kecerdasan kewargaan". Kurangnya upaya menautkan keragaman kecerdasan personal ke dalam kecerdasan kolektif kewargaan mengakibatkan banyaknya manusia baik dan cerdas tidak menjadi warga negara dan penyelenggara negara yang baik dan cerdas.³ Kualitas sumber daya manusia yang baik dan cerdas bukan satu-

² Yudi Latif, *Kecerdasan Kewargaan*, Harian Kompas, edisi 6 Oktober 2015, h.15.

³ Yudi Latif, *Kecerdasan Kewargaan*, h.15

satunya penentu tumbuhnya sikap kecerdasan kewargaan. Sumber daya yang cerdas adalah dia yang selalu menatap masa depannya dengan kolektivitas orang lain bersama dirinya atau sebaliknya. Kolektivitas di sini menjadi amat penting.

Sebagai bangsa yang besar Indonesia penting untuk membangun “*Nation and Character Building*”, yaitu memiliki jangkar karakter yang kuat, tanpa itu bangsa besar bermental kecil, mengidap perasaan rendah diri, bangsa yang selalu melihat dunia luar sebagai teladan, tanpa menyadari dan menghargai kelebihan-kelebihan bangsa sendiri.⁴ Menurut Pontjo Sutowo, pembangunan bangsa (*nation building*) tantangannya jauh lebih berat dari perjuangan pembentukan negara (*state building*). Dalam pembangunan bangsa ada hal yang paling mendasar yaitu penyatuan sistem nilai dan pengintegrasian dari banyak institusi sosial yang diwarisi banyak suku, agama, dan golongan.⁵ Untuk penyatuan dan pengintegrasian nilai seperti yang dikemukakan oleh Pontjo tadi dibutuhkan kecerdasan kewargaan.

Untuk menjadi pemenang dalam era persaingan global dengan tetap terjaga harga diri bangsa tentu tugas utama dari setiap elemen masyarakat Indonesia selain mengubah mentalitas kepribadian juga mengembangkan kecerdasan kewargaan. Akan ada pertautan antara proses kekuatan mental-karakter individual yang baik dengan kecerdasan kewargaan sebagai bentuk mental-karakter kolektivitas dalam sebuah bangsa.

Kecerdasan Kewargaan adalah sebuah istilah untuk merujuk pada kecerdasan yang bersifat kolektif yang objek bahasannya adalah problematik bersama yang perlu solusi secara efektif, signifikan dan berkeadilan, yang dirasakan oleh setiap individu dan kolektivitas masyarakat, di sebuah kota, negara atau dunia, dengan kesatuan ide, visi, dan persepsi. Kecerdasan kewargaan adalah gambaran kemampuan masyarakat untuk memiliki kesadaran mengadaptasi-kan dirinya dengan lingkungan, dalam bersama-sama menentukan masa depan yang sehat, adil dan keberlangsungan hidup.⁶

⁴ Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, (Jakarta: Mizan, 2015), h. 103.

⁵ Pontjo Sutowo, *Kebangsaan Kita: Mengukuhkan Komitmen Kebangsaan Melahirkan Pemimpin Ideal yang Berkarakter*, Jakarta : Aliansi Kebangsaan, 2013, h.85

⁶ Douglas Schuler, “Community networks and the evolution of civic intelligence”, diakses dari: Proquest.com/docview/740998666, pada tanggal 24 Juli 2016. Schuler, Douglas (Summer 2001), "Cultivating Society's Civic Intelligence: Patterns for a New "World Brain" *Journal of Society, Information and Communication (2)*; Schuler, Douglas (2007), "Civic Intelligence and the Public Sphere", in Tovey, *Collective Intelligence: Creating a*

Untuk menghadirkan kolektivitas yang baik dalam sebuah bangsa, setiap pribadi memiliki kewajiban sosial (bahkan dituntut untuk mendahulukan kewajiban di atas hak) karena adalah satu persamaan, satu persatuan karakter dan watak yang tumbuh, lahir karena persatuan pengalaman dalam wahana nilai-nilai budaya. Dalam kaitan ini Soekarno pernah menyatakan, tidak ada dua bangsa yang cara berjuang sama, tiap-tiap bangsa mempunyai cara berjuang sendiri, mempunyai karakteristik sendiri. Hakikatnya bangsa sebagai individu mempunyai kepribadian sendiri yang terwujud dalam berbagai hal, budaya, ekonomi, watak dan lainnya.⁷ Sikap kecerdasan bukan hanya sekedar meniru budaya bangsa lain, tetapi menggali dan mengembangkan secara maksimal potensi jati diri yang dimiliki. Karena setiap bangsa lahir bersama jati dirinya sama seperti setiap individu yang lahir bersama fitrahnya.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia di mana kecerdasan spiritual yang berlandaskan al-Qur'an menjadi pedoman utamanya mestinya berbanding lurus dengan kecerdasan kewargaannya, karena dalam al-Qur'an banyak ayat yang mendorong untuk membangun peradaban sosial sebagai perwujudan kolektif dari sebuah bangsa atau negara. Karena selalu ada hubungan harmonis antara misi-misi ilahi yang dinyatakan dalam al-Qur'an dengan kondisi positif kehidupan sosial di mana setiap komponen masyarakat baik penguasa maupun warga negara berjalan pada koridor kebenaran. Sebaliknya selalu ada kaitan negatif dan kontradiktif antara misi-misi ilahi dengan kehidupan warga negara yang mementingkan kemewahan serta prestise.⁸

Bangsa Indonesia saat ini penting untuk menguatkan akar dan menumbuhkan rasa cinta terhadap negara sehingga siap untuk menghadapi ancaman yang dapat meruntuhkan eksistensi negara. Selama masih ada damai dan tidak mendapat gangguan dari negara lain perang bukan menjadi prioritas untuk membuktikan cinta negara, tetapi yang terbaik adalah melakukan pembangunan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,

Prosperous World at Peace, Oakton, Virginia: Earth Intelligence Network, ; dan Schuler, Douglas (2008), Liberating Voices: A Pattern Language for Communication Revolution, Cambridge, Massachusetts: MIT Press,

⁷ Yudi Latif, *Revolusi Pancasila...*, h. 109.

⁸ Ayatullah Muhammad Baqir Shadr, *Trend of History in Qur'an*, Terjemahan: M.S. Nasrullah, (Jakarta: Shadra Press, 2010), h. 108. Lihat juga: QS. 72:16, QS.7: 96 dan sebaliknya lihat: QS.34: 34-35.

karena ancaman nyata saat ini adalah terorisme, pencurian sumber daya alam, penyakit, bencana alam, kejahatan siber dan narkoba.⁹

Oleh sebab itu, butuh integrasi kecerdasan dalam diri manusia untuk memupuk kecerdasan kewargaan pada setiap individu, di antaranya yaitu: kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual. Ini karena beberapa masalah yang timbul dalam lingkungan sosial sangat memprihatinkan dan menakutkan.

Penulis melihat ada beberapa masalah yang timbul di masyarakat mulai dari terorisme, konflik agama dan sosial, sampai dengan praktik korupsi menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh bangsa ini.

Radikalisme dan Terorisme

Aksi-aksi radikalisme dan terorisme seolah tidak pernah surut dari waktu ke waktu. Warga sipil yang mestinya merupakan bagian dari komponen pendukung pertahanan dan keamanan nasional seakan berbalik menjadi penyebar ideologi radikal bahkan pelaku-pelaku aksi teror yang bisa menggoyahkan keutuhan negara secara masif. Radikalisme dan terorisme yang lebih banyak diwarnai oleh isu agama, secara historis bukanlah hal baru di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, terorisme sudah menjadi ancaman global.¹⁰ Pastinya agama tidak ada yang melahirkan radikalisme dan terorisme. Agama juga tidak mendoktrin pemeluknya untuk menjerat diri dengan kesulitan, apalagi menciptakan kepahitan kepada orang lain (QS 2:256 dan QS 2:78).

Program-program deradikalisasi yang diusung oleh pemerintah khususnya Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) seolah tidak mengurangi aksi-aksi teror di Indonesia. Tewasnya tokoh-tokoh teroris seperti Azhari, Noordin M. Top, Dulmatin dan yang lainnya belum akan menghentikan kaderisasi maupun munculnya pemimpin-pemimpin baru pelaku-pelaku terorisme.

⁹ Ryamizard Ryacudu, *Menumbuhkan Rasa Cinta Terhadap Negara*, Republika, 1 Juni 2016, h. 23.

¹⁰ Muhammad A.S. Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2016), h. 48.

Para pelaku teror tersebut selain Azhari dan Noordin M. Top, seluruhnya adalah WNI dan dilahirkan di Indonesia. Jiwa mereka sudah tidak merasa menjadi bagian dari warga negara Indonesia yang berideologi Pancasila di mana pluralitas dan multikulturalisme sangat dijunjung tinggi. Dalam jiwa mereka sudah tumbuh dan mengakar ideologi hasil propaganda seperti Al-Qaida dan ISIS. Meski banyak faktor yang memicu aksi-aksi radikalisme di Indonesia, seperti kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan lainnya, namun program besar yang mesti dilakukan untuk mengurangi radikalisme menurut A.S. Hikam adalah penguatan nasionalisme di era global,¹¹ supaya ideologi-ideologi yang bersumber dari luar tidak dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.

Konflik Agama dan Sosial

Indonesia sebuah negara dengan masyarakat yang bercirikan di satu sisi adanya komunitas mayoritas yang berpotensi hegemonis dan mendominasi, di lain sisi Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan masyarakat majemuk (*plural society*). Kenyataan ini membawa dampak pada dua hal: *pertama*, potensi konflik dan disintegrasi, *kedua*, sebagai sumber dinamika perubahan sosial dan kemajuan.¹² Kedua potensi tersebut bisa diolah sedemikian rupa oleh semua pihak yang memiliki kepentingan.

Dampak positif di antaranya berupa keanekaragaman yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk terbuka dalam menjalin hubungan sosial dan budaya, memberikan ikatan dan hubungan antara sesama dan dapat saling berbagi sahabat dan menghargai antar setiap budaya tanpa adanya batasan-batasan karena suatu perbedaan.

Sedangkan dampak negatif yaitu: a) Perbedaan nilai-nilai budaya dan norma dasar akan sulit disesuaikan antara masing-masing agama, akan selalu bertentangan dan ini akan mudah untuk memicu konflik; b) Memunculkan sikap etnosentrisme, yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, yang biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain; dan c)

¹¹Muhammad A.S. Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme...*, h. 49.

¹²M. Dawam Raharjo, *Merayakan Kemajemukan Kebebasan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Prenada Media Group 2010), h. 238.

Memunculkan sikap fanatisme dan ekstrem. Fanatisme merupakan suatu keyakinan yang kuat terhadap agama, kebudayaan, paham kelompok dan lain-lain. Ekstrem merupakan sikap sangat kuat, keras yang sangat solid terhadap persamaannya atau kelompoknya sendiri.¹³

Para pemangku kebijakan tentu harus mampu mengelola kedua potensi ini dengan baik, mengarahkan kepada yang positif dan tidak memanfaatkan potensi negatif untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan kelompok. Bangsa Indonesia dihadapkan pada problematik mendasar terkait dengan kerukunan kewargaan dalam berbangsa dan bernegara yang seolah tiada henti terancam konflik komunal misalnya, seperti Tolikara, Poso, Ambon, Sampit, Mesuji Lampung dan lainnya. Konflik-konflik tersebut mestinya tidak terulang terus ketika dikembangkan dan dibangun kecerdasan kewargaan.

Agama tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Agama justru menjadi dasar kehidupan yang ajarannya mengandung nilai-nilai universal agar dapat dihormati dan diaplikasikan ajaran bagi pemeluk agama masing-masing untuk mendukung pembangunan bangsa dan negara.

Privasi keyakinan agama wajib dijaga dengan baik dengan tidak mengganggu privasi keyakinan orang lain (QS 109:6). Sebaliknya agama menjunjung tinggi semangat kolektivitas dalam meningkatkan peran aktif dalam meraih hasil terbaik serta meminimalisasi potensi yang mengarah kepada kehancuran (QS 3:104).

Praktik Korupsi

Salah satu faktor utama gerakan radikalisme dan terorisme diakibatkan oleh kesenjangan ekonomi, kemiskinan, kesejahteraan yang tidak merata dan ketidakadilan. Bahkan sumber kekayaan alam yang melimpah belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat berpotensi dipergunakan kelompok radikal untuk mengampanyekan ideologi melalui isu-isu sensitif seperti

¹³Samsul Arifin, *Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme di Indonesia* (Jakarta: Intrans Publishing 2015), h. 37.

kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi dan ketidakmerataan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia.¹⁴

Sebagai contoh, di Papua wilayah kaya tapi miskin, PT. Freeport untuk setiap tahun mengeksploitasi lebih dari 1 (satu) juta ton emas, tembaga, dan perak. Keuntungan per hari sebesar Rp. 114 miliar, dan setahun bisa mencapai 41,04 triliun. Buruh Indonesia yang kebanyakan asli Papua mendapatkan upah terendah Rp. 6 juta per bulan, sementara buruh asing dari Amerika Serikat mencapai 30 kali lipat. Rakyat Papua merasa memiliki sumber daya alam yang melimpah tetapi tidak menikmatinya, yang akhirnya mereka menuntut merdeka.¹⁵

Kasus seperti di Papua ini menunjukkan betapa para pengambil kebijakan politik lengah dengan sengaja mengorbankan rakyat yang seolah tidur di atas hampan emas tapi yang dimakan lumpur. Sumber kekayaan alam menjadi ladang subur praktik korupsi bagi para pengambil kebijakan politik. Korupsi telah bersifat sistematis, mulai dari perencanaan pembangunan nasional sampai pada implementasi kegiatan proyek.¹⁶ Korupsi di Indonesia sudah endemi dan kronis yang dikategorikan kejahatan luar biasa karena selain merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara masif.¹⁷ Praktik-praktik monopoli, oligopoli, korupsi dan kolusi telah merongrong basis perekonomian nasional.

Contoh beberapa kasus di atas merupakan bentuk penyimpangan yang berdampak kepada penderitaan panjang masyarakat akibat perilaku menyimpang segelintir individu atau kelompok yang telah meninggalkan nilai-nilai moral. Penting untuk menumbuhkan sekaligus memperkuat etik dan tata nilai yang dapat memperkuat kemampuan setiap elemen masyarakat untuk membedakan antara benar dan tidak benar, yang hak dan batil, antara kepentingan sendiri dengan kepentingan masyarakat, yang patut dan tidak,

¹⁴ Muhammad A.S. Hikam, *Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisme...*, h. 129.

¹⁵ Paharizal & Ismantoro Dwi Yuwono, *Freeport Fakta-fakta yang Disembunyikan* (Jakarta: NARASI, 2016), cet: ke-1, h.118.

¹⁶ Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, *Sisi lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 15.

¹⁷ Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik, *Sisi lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi...*, h. 3.

layak dan tidak, yang adil dan zalim, dan sebagainya.¹⁸ Aktualisasi dari penguatan etik tersebut dengan sendirinya memunculkan sensitivitas untuk komitmen terhadap nilai-nilai budaya yang menjadi wahana pembentukan karakter kolektif atau lingkungan sosial dalam berbangsa dan bernegara. Karakter dalam arti ini adalah kecenderungan psikologis yang membentuk kepribadian moral,¹⁹ sehingga pada akhirnya setiap individu dari warga negara Indonesia menyadari untuk menunaikan kewajiban publiknya secara amanah, jujur, dan bersih untuk bersama-sama menjaga kehormatan bangsa dan negara, tidak mengkhianatinya dalam bentuk penyimpangan apapun yang dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan berbangsa-bernegara, seperti korupsi, radikalisme, terorisme, konflik sosial dan keagamaan. Suasana psikologis dan kejiwaan seperti inilah yang dimaksud sebagai kecerdasan kewargaan dalam arti mengedepankan dan menjunjung tinggi kewajiban publik sebagai bagian dari warga negara Indonesia.

Selanjutnya, dalam pandangan Islam, tindakan manusia harus dipertanggungjawabkan secara kolektif maupun individual. Suatu tindakan individual bisa berdampak pada dirinya bahkan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, tindakan kolektif adalah tindakan-tindakan suatu bangsa atau masyarakat secara keseluruhan, meskipun suatu perbuatan kolektif tidak berarti seluruh komunitas atau bangsa yang terkait berperan serta dalam pelaksanaannya. Dukungan moral bahkan persetujuan diam-diam sudah cukup dicatat sebagai bagian dari keterlibatannya (QS. Al-Isrā' [17]: 13-14, QS. Al-Jāthiyah [45]: 28-29). Suatu kemestian jika sebuah bangsa ingin mengubah kondisi sosialnya kepada yang terbaik, mereka harus memiliki kepekaan melakukan perubahan dalam dirinya (QS. Al-Ra'd [13]: 11).

Sebagaimana diungkap bahwa kecerdasan kewargaan adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan bekerja sama secara kooperatif dengan lingkungan masyarakat. Dari sini, kepekaan dalam diri secara individu dan keterikatan batin saling membutuhkan menjadi prasyarat utama pembentukan perubahan ke kondisi sosial yang terbaik. Isyarat tentang kecerdasan kewargaan ini di antaranya bisa dilihat dalam al-Qur'an surat al-Maidah [5]: ayat 2:

¹⁸ Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2016), cet: ke-5, h.76.

¹⁹Yudi Latif, *Revolusi Pancasila...*, h. 108.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.* (QS. Al-Mā'idah [5]: 2).

Selanjutnya, terdapat isyarat lain dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang interaksi harmonis yang menyangkut hubungan antara orang tua dan anaknya sebagai gambaran masyarakat terkecil dalam sebuah negara, sebagaimana dalam Q.S. al-Ṭūr [52]: 21):

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ
كُلُّ أُمَّرٍ يُمَّا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Artinya: *“dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.”*

Isyarat al-Qur'an tentang interaksi harmonis antar manusia dalam ayat di atas begitu kental. Hubungan harmonis yang tercipta antara orang tua dan anak, akan mengantarkan kebahagiaan hakiki bagi sang orang tua, ketika kelak di akhirat sang anak akan mengikuti kedua orang tuanya tinggal bersama dalam surga yang penuh kenikmatan.

Dalam kajian bahasa menurut Ṭabāṭabā'ī, ada perbedaan makna dari kata *ittaba'athum* dengan *alḥaqnā bihim*. Kata yang pertama, menunjukkan adanya kesamaan antara yang mengikuti dan mengikuti dalam bidang keikutan tersebut, yakni keduanya beriman dengan obyek iman yang sama dan sah, sedang yang kedua yakni *alḥaqnā* mengandung makna keikutan tetapi yang mengikuti tidak mencapai apa yang dicapai oleh yang diikutinya. Ṭāhir Ibn 'Ashūr berpendapat, bahwa kata *alḥaqnā* sengaja digunakan karena kata ini dapat mengandung isyarat kesegeraan atau keterlambatan, berbeda dengan kata *Kami masukkan* atau *Kami jadikan mereka bersama*. Ini boleh jadi mengisyaratkan bahwa ketergabungan anak cucu atau orang tua itu, baru terjadi setelah mereka mengalami sangsi Ilahi atas kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan.

Dari ayat ini dapat dipahami, al-Qur'an mengajarkan pola interaksi antar manusia harus dapat terjalin seharmonis mungkin. Dalam konteks keluarga,

orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan keagamaan dan ilmu pengetahuan secara umum agar dapat menghantarkan anaknya memiliki pengetahuan yang mumpuni. Hal ini agar anak-anak secara otomatis dinilai beriman dan mengikuti iman orang tuanya. Penunjukan kata (بإيمان) *bi īmān* pada ayat di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah anak keturunan yang telah dewasa dan yang telah memikul *taklif* atau beban.²⁰

Akhir kalimat pada ayat ini, menyatakan tentang tanggung jawab masing-masing individu terhadap apa saja yang dikerjakannya selama di dunia. Sa'īd Ḥawā menafsirkan kata (رَهِيْنٌ) *rahīn/terikat* pada ayat ini dalam arti seorang mukmin terikat dengan apa yang dikerjakannya dan akan mendapat ganjaran dari apa yang dikerjakannya. Sa'īd Hawa juga mengutip pendapat Ibn Kathīr dalam menafsirkan ayat ini yang menyatakan bahwa, seseorang tidak akan dikenakan balasan akibat perbuatan orang lain, baik yang dilakukan oleh anaknya atau bapaknya.²¹

Oleh sebab itu menurut Febriani, melalui bimbingan orang tua mengenai iman dan pendidikan secara umum, akan menciptakan generasi unggul yang memiliki kecerdasan paripurna, seperti kecerdasan emosi (*emotional quotient*), kecerdasan intelegensi (*intelligent quotient*), kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*), kecerdasan sosial (*social quotient*), dan kecerdasan dalam menghadapi permasalahan kehidupan (*adversity quotient*). Pada akhirnya, akan menciptakan generasi yang *skillfull*, menjadi sosok manusia berguna dan memiliki tanggung jawab dalam interaksi vertikal dan horizontalnya.²²

Dari penafsiran ayat di atas dapat dipahami bahwa, isyarat al-Qur'an mengenai konsep keluarga harmonis yang akan mempengaruhi relasi harmonis dalam lingkungan di masyarakat, mengindikasikan pentingnya membentuk keluarga harmonis sebagai masyarakat terkecil yang paham akan konsep kewargaan. Jika seluruh anggota dalam keluarga memahami ini, maka

²⁰Muhammad Qurasih Shihab, *Tafsir al-Misbah...*, vol. 13, h. 21-20. Lihat juga: Muḥammad Ḥusain al-Ṭabāṭabā'ī, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān* (Teheran: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1397 H), cet. III. Lihat juga: Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Ashūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr* (t.tp: al-Dār al-Tunisiyyah li al-Nashr, t.th), h. 109

²¹Sa'īd Hawā, *al-Asās fī al-Tafsīr* (Kairo: Dār al-Salām, 1989), cet. II, juz. 10, h. 5544.

²²Nur Arfiyah Febriani, *Ekologi Berwawasan Gender*, (Bandung: Mizan, 2011), h. 139-141.

interaksi harmonis antara masyarakat akan terjalin dan perdamaian akan terjaga.

Pada pembahasan berikutnya buku ini akan menjelaskan beberapa persoalan, antara lain: Bagaimana kajian teoritis tentang kecerdasan kewargaan? Bagaimana analisis tentang pentingnya pendidikan multikulturalisme dalam menumbuhkan kecerdasan kewargaan? Lalu, apa saja term al-Qur'an yang berhubungan dengan kecerdasan dan kewargaan? Kemudian, bagaimana isyarat al-Qur'an tentang kecerdasan kewargaan dan masyarakat ideal seperti apa yang digambarkan dalam al-Qur'an? Dan terakhir, Bagaimana upaya aplikasinya dalam institusi keluarga sebagai lingkup masyarakat terkecil dalam sebuah negara?



BAB II:

KECERDASAN KEWARGAAN

Dalam bahasa Inggris, kata kecerdasan memiliki padanan kata yang paling dekat yaitu kata *intelligence* yang berasal dari kata *intellect*, artinya kemampuan memahami dan berpikir.²³ Dalam kamus bahasa Indonesia, kecerdasan berasal dari kata dasar “cerdas” yang mengandung arti sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti dan sebagainya), ketajaman berpikir. Kecerdasan dalam arti lain adalah perihal cerdas, perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan perkembangan akal budi (seperti kepandaian, ketajaman, akal pikiran).²⁴ Pengertian kecerdasan tersebut tidak saja membatasi pada ukuran *intelligence quotient* seseorang yang dicirikan sebagai kegiatan otak kiri yang tumpuannya logis matematis dan mencakup di dalamnya kemampuan

²³ Pater Salim, *Advanced English Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1993), h. 152.

²⁴ Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 59.

ilmiah dan rasional,²⁵ namun juga akal budi yang di dalamnya menekankan pada kecerdasan emosional yang sangat penting di dalam kehidupan manusia untuk bertindak sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan mencerdaskan. Tolak ukur kecerdasan didasarkan pada sejauh mana seseorang melakukan tindakan, baik itu aksi maupun refleksi. Dengan demikian, kecerdasan adalah mengarahkan (optimalisasi) pengetahuan dan akal pikiran kepada tindakan positif, konstruktif dan produktif. Tolak ukur ini berkesesuaian dengan apa yang telah dirumuskan kamus Oxford, di mana *intelligence* atau kecerdasan dimaknai sebagai “*the ability to acquire and apply knowledge and skills*” (kemampuan untuk menghasilkan dan mentransformasikan pengetahuan dan ragam keahlian).²⁶

Memperkuat makna dan peran kecerdasan di atas, beberapa definisi di bawah ini dapat melengkapinya, misal dalam kamus New World Dictionary of The American Language, *intelligence: the ability to learn or understand from experience, ability to respond quickly and succesfully to a new situation; use of the faculty of reason in solving problems, directing conduct*.²⁷ (kemampuan memahami, mengerti, merespon dengan cepat pengalaman, keberhasilan membawa kepada situasi baru, menggunakan kemampuan berpikir dan mengarahkan perilaku dalam memecahkan masalah). Ungkapan lain bisa dilihat juga dalam kamus Cambridge, *intelligence; the ability to understand and learn and make judgments or have opinion that are based on reason*.²⁸ (kemampuan memahami, mempelajari, memutuskan serta mengambil kesimpulan berdasarkan sejumlah alasan).

Beragam definisi yang diungkap di atas dapat dipahami, kecerdasan merupakan kemampuan untuk mengetahui, memahami, merespons dan mentransformasikan pengetahuan menjadi tindakan nyata. Sebagai makhluk sosial tindakan seseorang secara otomatis memiliki efek yang simultan kepada individu lain, alam, masyarakat lingkungan sekitar bahkan masyarakat dunia (global). Individu yang berintelighensi parameternya adalah

²⁵ Julia Jasmine, *Profesional's Guide: Teaching with Multiple Intelligences*, diterjemahkan oleh Purwanto dengan judul “Metode Mengajar Multiple Intelligences”, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2016), h. 19.

²⁶ Oxford University, *Oxford American Dictionary*, (New York: Oxford University Press, Inc. 2010), h. 476.

²⁷ New World Dictionary of The American Language (t.tp.: The World Publishing Company, 1978) second college edition, h. 732.

²⁸ Cambridge University, *Cambridge International Dictionary of English* (London: Cambridge University Press 1995), h. 739

kemampuan menjalankan fungsi sosialnya, baik hak-hak maupun kewajibannya, merekonstruksi dan mengadaptasi diri dengan lingkungan yang setiap saat berubah.

Dalam literatur berbahasa Arab, term kecerdasan ditinjau dari perspektif etimologis diungkapkan dalam beberapa kosa kata, di antaranya;

Dalam literatur berbahasa Arab, term kecerdasan ditinjau dari perspektif etimologis diungkapkan dalam beberapa kosa kata, di antaranya;

1. *Al-Fathanah* atau *al-Fithnah*, artinya kecerdasan, yang semakna dengan *al-fahm* (memahami).²⁹
2. *Al-dzakā'* yang berarti *hiddah al-fuād wa sur'ah al-fithnah* (kepekaan intuisi untuk cepat memahami). *Al-Dzakā'*, dalam arti *al-Fahm* adalah "*sāri' al-qabūl* (cepat mengadaptasi).³⁰ Perbedaan makna *al-fithnah* dan *al-dzakā'*, secara substansi *al-dzakā'* lebih unggul nilai maknanya. Menurut Ibn Hilal al-Askari *al-Dzaka* mengandung makna "*tamām al-fithnah* (sempurna dalam berinteligeni);³¹
3. *Al-Hadzaqah*, bermakna *al-mahārah fī kull 'amal* (tepat/cermat dalam mengambil tindakan/sikap).³²
4. *Al-Nubl*, semakna dengan *al-dhakā'* dan *an-najabah*, yang artinya produktif.³³

Kemampuan beradaptasi dan mengembangkan lingkungan menjadi parameter utama seseorang memberdayakan kecerdasan dalam sosialnya, termasuk kecerdasan sebagai warga negara di wilayah yang menjadi domisilinya. Istilah *civic intelligence* pada tulisan ini dimaknai sebagai kecerdasan kewargaan. Secara historis istilah kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) itu sendiri telah kemukakan oleh seorang Pendeta dari Amerika Josiah dalam tulisannya *The Twentieth Century City* yang diterbitkan pertama kali di New York tahun 1898. Apakah istilah ini sebelumnya pernah muncul atau tidak, memerlukan penelusuran lebih lanjut. Setelahnya, penggunaan istilah atau berkaitan dengan *civic intelligence* terus

²⁹ Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mashri, *Lisān al-Arab*, (Beirut: Dār Shadir, 1882), Cet. I, Juz 13, h. 323.

³⁰ Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab...*, juz: 3, h. 1511.

³¹ Abu Hilāl al-Askari, *Mu'jam al-Furuq al-Lughawiyah*, (t.tp. : al-Maktabah asy-Syamilah, t.th), juz 1, h. 166.

³² Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab...*, juz: 2, h. 812

³³ Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab...*, juz: 6, h. 4330.

bermunculan yang ditulis oleh para ilmuwan. Mereka antara lain Douglas Schuler, Sandiana ILIE & Oana ILIE, dan Harold Stubblefield. Di Indonesia, penulis yang telah menggagas topik seperti itu diantaranya Yudi Latif, H.A.R. Tilaar dan Azyumardi Azra bersama Tim ICCE (Indonesian Center for Civic Education).

Kewargaan menurut Azyumardi semakna dengan *civic* dalam bahasa Inggris. Di lain pihak, Zamroni dan Tim CICED (*Center Indonesian for Civic Education*) memaknai *civic* dengan kewarganegara-an. Dalam bahasa Indonesia term kewargaan dan kewarganegaraan menjadi istilah yang populer di kalangan akademisi, politisi dan literatur ilmu ketatanegaraan. Siapa pun sepakat pendidikan kewargaan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk menjadi asupan utama bagi semua warga negara sehingga melahirkan generasi muda warga negara yang mencintai negara dan tanah kelahirannya. Pembentukan karakter dan mental warga negara menjadi misi utama dari pendidikan kewargaan, sebagaimana dinyatakan oleh Azyumardi Azra; *pendidikan kewargaan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia (global society).*³⁴

Citizenship dan *civic*, dua kata yang merepresentasikan makna kewarganegaraan atau kewargaan dalam bahasa Indonesia sehingga mempertegas keanggotaan seseorang dalam sebuah negara yang mempunyai kedudukan secara khusus, tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negaranya. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam menentukan status kewarganegaraan, dimana setiap negara berbeda dalam menentukan status dan asas kewarganegaraan seseorang.³⁵ Term kewargaan lebih berorientasi kepada konteks sikap, perilaku (*attitude*) dan tanggung jawab sebagai warga negara, baik yang diikat dengan status kewarganegaraan dalam sebuah negara maupun sebagai warga negara dari masyarakat lebih luas, baik regional maupun global. *Civic intelligence* adalah sebuah terjemahan yang dapat dipilih untuk memaknai kecerdasan kewargaan,

³⁴ Dede Rosyada, et al, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 6.

³⁵ Dede Rosyada, et al, Pendidikan Kewargaan (Civic Education)...., h. 74.

mengingat kewargaan memiliki cakupan makna lebih luas dibanding kewarganegaraan.

Civic dan *citizenship* memiliki kaitan yang tidak terpisahkan. Harold W. Stubblefield menggunakan kedua term ini dalam tulisannya sebagai bentuk sikap yang muncul dari perubahan sosial di Amerika karena efek kemajuan sains, teknologi, industri, dan urbanisasi, sehingga kondisi ini menuntut pada rumusan dan konsepsi baru tentang kewarganegaraan (*citizenship*) terutama persoalan bagaimana menciptakan warga negara yang cerdas (*intelligent citizenship*). Kehadiran warga negara yang cerdas menjadi kunci dalam menyikapi setiap perubahan sosial akibat kemajuan tersebut. Di sisi lain, setiap warga negara memiliki tugas mengembangkan kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) yang bertumpu pada memahami kepentingan umum (*public importance*), secara efektif terlibat dalam upaya mencari solusi, bekerjasama (*cooperation*), membangun tanggung jawab (*responsibility*), mengedepankan akal sehat untuk saling pengertian (*reason and reasonableness*), dan mendisiplinkan diri (*self-discipline*) dalam kebersamaan.³⁶

Salah satu pakar ilmu pendidikan dan sosial Indonesia, H.A.R. Tilaar merumuskan konsep *civic intelligence* dalam bentuk kemampuan seseorang untuk mengetahui dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, serta mentransformasikan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Nilai-nilai tersebut bersumber dari moral dan etika transendental.³⁷ Untuk menambah definisi *civic intelligence* selain yang dirumuskannya, H.A.R. Tilaar mengutip konsep dan rumusan *Massachusetts Institute of Technology Encyclopedia of Cognitive Sciences*, *civic intelligence* sebagai “kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri, memilih dan mengembangkan lingkungannya”.³⁸ Apa yang menjadi rumusan

³⁶ Harold W. Stubblefield, *Adult Education for Civic Intelligence in the Post World War I Period*, Jurnal Adult Education Volume XXVI No.4 Spring: 1976, h. 288.

³⁷ H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 450.

³⁸ H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, ... h. 448.

H.A.R. Tilaar mendapat pengakuan dari Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dipelopori oleh Azyumardi Azra.³⁹

Lebih lanjut H.A.R. Tilaar menjelaskan, seseorang disebut sebagai individu cerdas apabila dirinya memiliki tiga kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu kemampuan adaptasi, konstruktif dan selektif. Lingkungan atau dunia manusia adalah, lingkungan budaya, lingkungan alam dan lingkungan proksimitasnya. Selain beradaptasi, seseorang mampu mengonstruksi lingkungannya menjadi lebih baik ataupun sebaliknya, serta dapat menyeleksi apa yang diinginkan terhadap lingkungannya. Itulah lingkungan budaya yang dikembangkan bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakatnya.⁴⁰ Asas kolektivitas dan kebersamaan menjadi modal penting dalam membangun kecerdasan kewargaan, terutama ketika menghadapi problem dan tantangan berdasarkan besar dan kecilnya serta kompleksitas persoalan yang menjadi perhatian bersama.

Oleh sebab itu, konsep dan rumusan lain dari kecerdasan kewargaan adalah bentuk kecerdasan kolektif yang diarahkan untuk mengatasi tantangan bersama, ada atau tidaknya akan menentukan sejauh mana efektif tantangan ini teratasi serta terpenuhi. Kecerdasan kewargaan harus hadir serta dikembangkan di setiap tingkat lapisan masyarakat, baik dalam jumlah besar maupun masyarakat kecil. Masalah yang dihadapi masyarakat tidak bisa selesai apabila hanya dipercayakan kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan atau kelompok elite sosial lainnya karena tantangan yang dihadapi semakin kompleks, variatif, riskan dan sulit diprediksi.⁴¹

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan, bahwa kemunculan istilah dan konsep kecerdasan kewargaan lahir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan perubahan sosial. Sosiolog Ridwan Lubis menyatakan, pernyataan umum yang tidak dapat terelakkan dan menjadi kunci dari topik pembicaraan perubahan paradigma tidak lain karena dunia

³⁹ A. Ubaedillah dan Abdul Razak (Penyunting), Pendidikan Kewargaan Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Edisi Ketiga, h. 8.

⁴⁰ H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia...*, h. 449.

⁴¹ Douglas Schuler, *Online Deliberation and Civic Intelligence, Open Government Transparency, Collaboration, and Participation in Practice*, (Amerika: Editor: Daniel Lathrop O'Reilly Media, Inc. 2010) ISBN:0596804350 9780596804350, h. 91

mengalami perubahan.⁴² Perubahan yang terjadi bisa bersifat lokal, domestik, regional bahkan menjelma menjadi gejala global. Sedangkan dimensi perubahan sosial itu bisa diakibatkan oleh berbagai faktor, di antaranya ekonomi, politik, sistem informasi bahkan keagamaan.

A. Rumusan Kecerdasan Kewargaan

Ketidaksamaan perubahan yang terjadi di tiap kawasan memunculkan perbedaan konsep dan rumusan kecerdasan kewargaan yang ditampilkan oleh para ahli, sehingga kultur lokal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi pengembangan kecerdasan kewargaan. Pada tabel 2.1 berikut adalah konsep dan rumusan kecerdasan kewargaan yang diketengahkan dari beberapa ahli.

*Tabel 2.1
Rumusan Kecerdasan Warga Menurut Ahli*

No	Pemikir	Rumusan
1.	Douglas Schuler	Kecerdasan Kewargaan merupakan bagian dari bentuk kecerdasan kolektif dengan bangunan sebagai berikut: <i>Pertama</i> , kecerdasan kewargaan diarahkan menuju berbagai jenis perbaikan sosial. <i>Kedua</i> , kecerdasan kewargaan tidak seharusnya dipahami bersifat rasional semata, di mana semua hal memungkinkan dimaknai dan dihitung berdasarkan banyaknya imbalan yang diterima. <i>Ketiga</i> , kecerdasan kewargaan seperti kecerdasan individu bergantung pada konteks, apa yang cerdas dalam

⁴²Ahmad Fedyani Saifuddin, *Agama Dalam Pendekatan Sosial Budaya: Dari Positivisme ke Konstruktivisme*, Kata Sambutan dalam buku H. M. Ridwan Lubis, *Sosiologi Agama, Memahami Perkembangan Agama dalam Interaksi Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h.viii

		<p>satu situasi tidak selalu dinilai cerdas di situasi lain. Entitas kecerdasan ditentukan oleh tantangan dan persoalan. <i>Keempat</i>, salah satu tujuan kecerdasan kewargaan adalah mengembangkan kecerdasan kewargaan yang lebih baik.</p>
2.	Harold Stubblefield W.	<p>Perubahan sosial yang diakibatkan oleh perkembangan sains, teknologi, industrialisasi, urbanisasi, krisis ekonomi dan keberadaan pemerintahan totaliter. Kondisi ini menuntut setiap warga negara harus memiliki kecerdasan kewargaan (<i>civic intelligence</i>) yang didasarkan pada prinsip; memahami kepentingan umum (<i>public importance</i>) dan secara efektif terlibat dalam upaya mencari solusi, bekerjasama (<i>cooperation</i>), membangun tanggung jawab (<i>responsibility</i>), mengedepankan akal sehat serta saling pengertian (<i>reason and reasonableness</i>), mendisiplinkan diri (<i>self-discipline</i>) dalam kebersamaan. Untuk menjadi warga negara yang ber-kecerdasan kewargaan maka harus diberikan pendidikan kewargaan (<i>civic education</i>) dengan tujuan: <i>Pertama</i>, tingkat partisipasi warga negara., <i>Kedua</i>, warga negara yang sadar serta berpengetahuan. <i>Ketiga</i>, pengembangan kemampuan analisis dan intelektual.</p>

3.	Josiah Strong, D.D, 1898	Kecerdasan kewargaan (<i>civic intelligence</i>), moral kewargaan (<i>civic morality</i>) dan karakter moral (<i>moral character</i>) tiga komponen penting menjadi modal utama dalam upaya membangun sistem demokrasi dan pemerintahan yang baik di negara besar, seperti Amerika. Jika tidak demikian, dengan jumlah populasi yang besar akan lebih banyak memicu potensi tindakan-tindakan anarki. ⁴³
4.	Sandiana ILIE & Oana ILIE	<i>Civic intelligence</i> adalah kecerdasan yang berfokus pada peningkatan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Karena secara naluri manusia cenderung untuk mewujudkan dukungan dan membantu orang lain bahkan dalam situasi mengancam kehidupan dirinya sendiri.
5.	Yudi Latif	Kecerdasan kewargaan merupakan cerminan kedirian bersifat publik. Keragaman kecerdasan yang dimiliki oleh individu harus teraktualisasikan ke dalam kecerdasan kolektif kewargaan. Pendidikan yang terlalu menekankan kecerdasan personal sering kali mengabaikan usaha menautkannya ke dalam kecerdasan kolektif-kewargaan. Akibatnya, banyak manusia baik dan cerdas tidak menjadi warga negara dan penyelenggara

⁴³ Josiah Strong, D.D. : *The Twentieth Century City*, (New York: The Baker and Taylor CO, 1989), h. 91

		<p>negara yang baik dan cerdas (sadar akan kewajiban dan haknya). Sebagai contoh, bangsa Indonesia sebagai masyarakat multikulturalisme, di mana setiap warga negara memiliki kewajiban untuk saling bahu-membahu membangun tanggung jawab yang sama sebagai warga negara Indonesia.⁴⁴ Pengembangan kecerdasan kewargaan lebih fundamental bagi suatu bangsa yang ingin membebaskan diri dari kolonialisme individu. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua manusia bergantung pada bentuk-bentuk kerja sama dan kolaborasi dengan sesama yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunan. Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik.⁴⁵</p>
6.	H.A.R. Tilaar	<p>Rumusan dan konsep <i>civic intelligence</i> tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengetahui dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, serta</p>

⁴⁴ Yudi Latif, *Kecerdasan Kewargaan*, *Harian Kompas*, edisi 6 Oktober 2015, h.15.

⁴⁵ Dikutip oleh Yudi Latif, *Pemuda Berkecerdasan Kewargaan*, Jakarta : Media Indonesia, 28 Oktober 2016, h. 6.

		<p>mentransformasikan nilai-nilai tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Nilai-nilai tersebut bersumber dari moral dan etika transendental.⁴⁶ Seseorang disebut sebagai individu cerdas apabila dirinya memiliki tiga kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu kemampuan adaptasi, konstruktif dan selektif. Lingkungan atau dunia manusia adalah, lingkungan budaya, lingkungan alam dan lingkungan kedekatannya. Selain beradaptasi, seseorang mampu mengonstruksi lingkungannya menjadi lebih baik ataupun sebaliknya, serta dapat menyeleksi apa yang diinginkan terhadap lingkungannya. Itulah lingkungan budaya yang dikembangkan bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakatnya.</p>
7.	<p>Azyumardi Azra dan Tim ICCE (<i>Indonesian Center for Civic Education</i>).</p>	<p>Rumusan dan konsep kecerdasan kewargaan menurut Azyumardi memiliki kesamaan dengan rumusan H.A.R. Tilaar, seseorang disebut sebagai individu cerdas apabila dirinya memiliki tiga kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu kemampuan adaptasi, konstruktif dan selektif. Pendidikan kewargaan (<i>civic education</i>) menjadi kunci dalam</p>

⁴⁶ H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia.....*, h. 450.

		<p>mempersiapkan generasi muda menjadi warganegara yang cerdas dan sadar terhadap hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga membangun kesiapan warganegara menjadi warga dunia (<i>global society</i>).⁴⁷</p>
--	--	--

Dari beberapa rumusan konsep kecerdasan kewargaan yang dikemukakan oleh para tokoh di atas, secara garis besar warga negara yang disebut memiliki kecerdasan kewargaan apabila indikator orientasinya dipusatkan pada;

1. Perbaikan sosial yang menjadi kepentingan publik sebagai tanggung jawab dan cita-cita bersama.
2. Pembentukan karakter moral (*moral character*) dan moral berwarganegara (*civic morality*) atau pembentukan kedirian individu menuju kedirian publik.
3. Pemberian dukungan dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Adaptif dan selektif dengan perkembangan zaman.
5. Upaya merekonstruksi lingkungan menjadi lebih baik.
6. Mempersiapkan generasi muda untuk sadar pada hak, tanggung jawab, dan kewajiban sebagai warga negara, serta warga dunia.

B. Cinta Negara dan Kecerdasan Kewargaan

Menjadi atau memilih status kewarganegaraan dalam sebuah negara sebagai bukti awal seseorang mencintai negaranya. Kecintaan terhadap negara tidak berhenti di situ, tetapi ada banyak tanggung jawab lebih besar dari sekedar formalitas kewarganegaraan. Di antara tanda kecintaan kepada negara menurut Higham dalam sebuah tulisannya tahun 1920, “*Looking Forward: Mass Education through Publicity*”,⁴⁸ bahwa bagian yang sangat

⁴⁷ Dede Rosyada, et al, Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani..., h. 6.

⁴⁸ Charles Frederick Higham, *Looking forward : mass education through publicity*, (New York : Alfred A. Knopf, 1920)

penting dari tugas warga negara adalah mempromosikan atau meyakinkan bahwa kawasan domisilinya sebagai lokasi atau kota terbaik yang paling tepat untuk dikunjungi dengan segala bentuk keberhasilan yang dicapai dalam berbagai bidang. Semangat publik, menurutnya, dibangun di atas cinta dan kebanggaan terhadap kawasan sekitar. Hal ini membuat setiap individu menjalankan profesi dalam semangat mendukung kemajuan daerahnya, baik sektor industri pariwisata maupun sektor ekonomi lainnya. Memiliki kepedulian terhadap kemajuan daerah tempat di mana digantungkan masa depan kehidupannya merupakan wujud dari upaya mengaktualisasikan kecerdasan masyarakat atau kecerdasan kewargaan yang benar-benar nyata. Tugas utama yang harus dilakukan seluruh elemen warga negara adalah mendukung pemerintah dalam penguatan sistem penataan atau pengelolaan sumber daya alam sekitar, mempublikasikan, serta mendorong perubahan yang lebih luas dalam mengembangkan sikap dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Sejalan dengan Higham, apa yang menjadi gagasan Dewey bahwa kecerdasan sejati adalah kecerdasan yang selalu menumbuhkan kreativitas. Dia mengungkapkan tentang pentingnya berperilaku kooperatif sebagai aktualisasi kecerdasan kewargaan yang sangat diperlukan untuk hidup bermasyarakat dan menjunjung nilai-nilai demokrasi.⁴⁹ Ciri warga negara yang cerdas jika satu sama lainnya secara masif saling membahu untuk meraih impian bersama (*al-khair*), dan sebaliknya secara bersama pula mengantisipasi perilaku buruk segelintir orang yang akan membawa kepada kondisi sosial yang buruk atau mengakibatkan terjatuh pada keburukan stadium kejadian luar biasa (*al-munkar*), sehingga tindakan bersama ini akan menghantarkan masyarakat meraih kejayaan (*muflihūn*) [Ali Imran[3]:104].

Cinta negara dapat diwujudkan misalnya melalui peningkatan kreativitas sebagai upaya membangun kemandirian personal serta mampu menginspirasi secara positif masyarakat di lingkungan sekitar. Memberdayakan sumber daya secara mandiri yang dimiliki oleh masyarakat lokal berarti telah terlibat secara aktif berkontribusi positif mempromosikan keunggulan kawasan lokal dan sekaligus mempromosikan negara melalui nilai-nilai budaya.

⁴⁹ Dewey, J. *Democracy and education*, (New York: The Free Press, 1916)

C. Elemen Negara Pendukung Kecerdasan Kewargaan

Greg menyatakan butuh kerja sama yang integratif antar elemen bangsa sebagai bentuk penyamaan persepsi dalam kompleksitas gagasan pembangunan berkesinambungan sebagai tindakan praksis yang dapat dilakukan oleh semua individu dalam kehidupan sehari-hari. Semua lapisan masyarakat harus memiliki semangat berpikir global dengan tetap bertindak secara lokal (*spirit of thinking globally and acting locally*). Pemangku kekuasaan politik, ilmuan dan masyarakat, dengan berbagai kemampuan, alat dan media yang dimiliki untuk dapat andil serta berperan aktif dalam proses mendukung pembangunan infrastruktur serta sumber daya manusia secara berkelanjutan di lingkungannya.⁵⁰ Pembangunan dan pengembangan wilayah yang bertarap internasional tidak boleh mengorbankan kearifan lokal yang menjadi bagian penting dari kekayaan kultur masyarakat.

Salah satu langkah praksis yang bisa menumbuhkan kecerdasan kewargaan adalah sektor pendidikan. Pendidikan mengambil peran penting bagi upaya mencetak generasi bangsa dan masyarakat yang peduli ilmu dan informasi. Penelitian dan konsep pendidikan seumur hidup memainkan peran penting dalam kehidupan, menjadi alat manusia untuk terus beradaptasi dengan segala perubahan yang terus dihadapinya. Peran pendidikan dan dukungan pemerintah sangat dibutuhkan untuk membentuk masyarakat yang melek informasi dan secara bijak menggunakan pemanfaatan informasi karena mempengaruhi pola interaksi antar masyarakat yang sangat luas.

Kepekaan masyarakat dalam merespons informasi yang bersumber dari media sosial misalnya, pada gilirannya juga akan mempengaruhi sekaligus membentuk tingkat kecerdasan kewargaan bagi masyarakat. Oleh karena itu adalah sangat penting bagi generasi muda diajarkan tentang bagaimana cara menerima informasi yang baik dan benar.⁵¹ Islam lebih dari seribu tahun yang lalu telah berbicara tentang bagaimana cara merespons informasi. Informasi yang bermuatan konten negatif perlu diantisipasi bersama supaya tidak mempengaruhi pola pemikiran atau membentuk karakter sosial sekelompok tertentu, sehingga dijadikan alat untuk melakukan pembunuhan karakter

⁵⁰ Greg Paine, A Pattern-Generating Tool for Use in Semi-Structured Interviews, *The Qualitative Report*; Fort Lauderdale Vol. 20, Iss. 4, (Apr 20, 2015): 468-481.

⁵¹ Sandina Ilie, dan Oana Ilie, "Communication Patterns in Society and Civic Intelligence", *Land Forces Academy Review; Sibiu* Vol. 15, Iss. 2, (2010): 221-228.

individu atau kelompok lainnya. Dengan ajaran cara merespons informasi, sesungguhnya Islam telah mengimplementasikan sikap kecerdasan kewargaan dan mengajak manusia untuk cerdas sehingga tidak merugikan kelompok lain dari perilakunya di kemudian hari [al-Hujurat [49]:6].

Perlu menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah dan swasta, yaitu persoalan ketimpangan dalam kesempatan menempuh pendidikan, terlalu terkonsentrasinya kehidupan sosial di perkotaan, dan minimnya akses kesehatan masyarakat. Para praktisi pendidikan, peneliti dan pemerhati kesehatan masyarakat harus berbagi komitmen untuk melakukan pekerjaan berdasarkan peta wilayah, meningkatkan partisipasi masyarakat, berkeadilan dan berorientasi pada pemberdayaan kalangan milenial. Program interdisipliner yang dijalankan dapat mewujudkan nilai-nilai bersama dan cita-cita bersama, seperti penyediaan pusat berbasis masyarakat, dan fasilitas umum di lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Integrasi pemerintah dan masyarakat pada bidang tersebut merupakan peluang sebagai bentuk intervensi dalam masalah pendidikan, kesehatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk terus menangani tujuan-tujuan bersama maka kolaborasi dalam perencanaan harus berangkat dari nilai-nilai bersama.⁵²

Selain itu, untuk mewujudkan tujuan pendidikan kewarganegaraan Foster dan Padgett menyarankan kepada para pendidik untuk mempersiapkan siswa supaya menjadi warga negara yang aktif dalam membangun demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai demokratis mengharuskan pelajar mengambil bagian dalam diskusi yang bermakna dan produktif bersama dengan narasumber dari berbagai sudut pandang yang variatif.⁵³ Narasumber yang *expert* akan menjadi sumber inspirasi bagi kalangan usia produktif untuk meningkatkan kemampuan individu dalam persaingan tantangan zaman yang semakin ketat. Pelajar, menurut Martinsone harus lebih siap menghadapi berbagai pendapat, perilaku, serta keyakinan yang berbeda di tengah masyarakat atau sedang menjadi fokus perhatian pemerintah, karena pada akhirnya kebijakan publik sering kali merupakan hasil dari debat publik yang mengedepankan

⁵² Cohen, Alison Klebanoff; Schuchter, Joseph W, "Revitalizing Communities Together: The Shared Values, Goals, and Work of Education, Urban Planning, and Public Health", *Journal of Urban Health*; New York, Vol. 90, Iss. 2, (Apr 2013): 187-196. DOI:10.1007/s11524-012-9733-3.

⁵³ Foster, S. J., & Padgett, C. S. (1999). Authentic historical inquiry in the social studies classroom. *Clearing House*, 72(b), 357-363.

kecerdasan, atau kegiatan-kegiatan diskusi yang intensif.⁵⁴ Warga negara akan semakin dewasa dalam berdemokrasi ketika telah mampu menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan pendapat, perilaku dan keyakinan, yang tidak lagi tertutup tetapi juga dapat diperdebatkan di forum terbuka untuk menghasilkan kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam teori demokrasi tradisional, esensi dari prosedur demokrasi budaya debat publik menjadi sarana penting dari pencarian sebuah solusi alternatif dalam masalah sosial. Demokrasi, yang juga bisa dipahami sebagai bentuk tawaran solusi untuk penyelesaian konflik sosial. Sebagai asumsi, bahwa kebijakan publik dan peraturan menjadi wadah bagi saluran pendapat secara mayoritas yang dihasilkan dari debat terbuka tentang isu-isu publik dan terus terbuka untuk menerima kritik dan diskusi.⁵⁵ Islam menjunjung tinggi perdebatan publik yang membawa kepada arah perbaikan, yang diistilahkan al-Qur'an sebagai jalan Tuhan (*sab³li rabbik*), dengan melibatkan sebanyak-banyaknya partisipan, sehingga memunculkan pesan-pesan konstruktif (*al-hikmah*) dan terang benderang suatu persoalan baik sisi positif maupun negatifnya. Perdebatan publik harus menawarkan sesuatu yang lebih baik dari keadaan sebelumnya [al-Nahl [16]:125.

Di sisi lain di Belahan Amerika, Westheimer dan Kahne mencatat meningkatnya kecenderungan untuk mengajarkan sikap patriotisme, kerja sama, dan meningkatnya partisipasi warga negara dalam kegiatan kepedulian sesama sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan pasca 9/11. Mereka menegaskan, bagaimanapun, pendidikan kewarganegaraan harus mendapatkan porsi yang lebih banyak untuk diajarkan, patriotisme dan demokrasi dalam mendukung kebijakan pemerintah. Westheimer dan Kahne percaya bahwa pendidikan kewarganegaraan yang sejati akan meningkatkan bentuk partisipasi, diskusi dan tindakan demokratis yang menarik dari warga negara.⁵⁶ Amy Gutman mengutip cendekiawan John Dewey, dia menyatakan, peningkatan pendidikan demokrasi yang besar di lembaga pendidikan akan berguna, bahkan sangat diperlukan untuk menciptakan warga negara yang

⁵⁴ Martinson, D. L. (2003). "Defeating the hidden curriculum: Teaching political participation in the social studies classroom." *Clearing House*, 76 (3), 132-135.

⁵⁵ Livingston, J. C. & Thomson, R. G. *The Consent Of The Governed*, (New York: MacMillan, 1971), h. 24.

⁵⁶ Westheimer, J., & Kahne, J. (2003). *Reconnecting education to democracy: Democratic dialogues*. Phi Delta Kappan, 85(1), 8-14.

demokratis".⁵⁷ Sejarawan terkenal Howard Zinn juga telah mempertimbangkan termasuk prinsip-prinsip demokrasi dalam studi sosial.⁵⁸

Diskusi yang mengedepankan pola komunikasi yang baik dan mengedepankan pola pikir yang konstruktif penting untuk diaplikasikan oleh segenap elemen bangsa, karena menurut Dewey, setiap orang berkeinginan menjalin hubungan sosial yang teratur dan menciptakan kebiasaan berpikir tentang perubahan sosial dengan tanpa menimbulkan persoalan baru.⁵⁹

D. Peradaban dan Kecerdasan Kewargaan

Caidi Nadia menyatakan bahwa berbagai ide para ahli, termasuk dalam mengintegrasikan antara kompetensi peradaban, kecerdasan kewarganegaraan, perilaku yang bermakna dan lain-lain, penting dilakukan demi membangun kompetensi masyarakat yang sehat. Lebih lanjut Nadia menjelaskan, untuk optimalisasi kompetensi masyarakat dibutuhkan seperangkat instrumen yang aksesnya menjangkau literatur atau teknologi yang tersedia di perpustakaan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, kepekaan, dan praktik yang lebih luas yang berkontribusi terhadap kesadaran sosial dan partisipasi efektif dalam berbagai bidang, termasuk partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi, pengembangan skill individu, pembangunan komunitas, dan sebagainya.⁶⁰

Fase peradaban manusia selalu ditandai oleh hasil kreativitas dan karya yang menjadi ciri khas masing-masing komunitasnya agar masyarakat menjadi maju dan berdemokrasi memerlukan beberapa sumber daya, seperti modal, teknologi, infrastruktur, tenaga kerja yang ahli, pelayanan masyarakat yang efisien dan perilaku elite politik yang profesional untuk menjadi

57 Gutman, A. *Democratic Education*. (Princeton, N. J.: Princeton University Press, 1999). h. 121.

58 Zinn, H., & Macedo, D Howard Zinn, on *Democratic Education*, (Boulder, Colorado: Paradigm Publishers 2004), h. 97.

59 Dewey, J. *Democracy and education*, (New York: The Free Press, 1916), h. 99.

60 Caidi Nadia, Building "civilisational competence": a new role for libraries?, *Journal of Documentation*; Bradford Vol. 62, Iss. 2, (2006): 194-212; lihat juga: Davies, S., Schwartz, A., Servon, L. and Pinkett, R. (2003), *Community Technology Centers as Catalysts for Community Change*, *Ford Foundation*, New York, NY; Kranich, N. (2005), "Civic partnerships: the role of libraries in promoting civic engagement", *Resource Sharing and Information Networks*, Vol. 17 No. 2.

teladan nyata. Tetapi ada juga sumber daya atau kekayaan budaya sebagai bagian yang paling mendasar, yang dapat disebut kompetensi peradaban.

Muncul istilah “kompetensi peradaban” yang digagas Sztompka sebagai persyaratan untuk partisipasi individu dalam berbagai aspek kegiatan masyarakat dan eksistensi sehari-hari dalam sebuah masyarakat maju, urban, melek teknologi dan konsumtif. Sztompka mengidentifikasi empat bidang yang menjadi ciri masyarakat modern dengan penguasaan 4 (empat) kompetensi peradaban, yaitu; ekonomi, politik, kesadaran sosial, dan perilaku positif dalam keseharian. Pada gilirannya, masing-masing budaya ini dikaitkan dengan keterampilan khusus. Misalnya, budaya usaha membutuhkan ketekunan inovatif, orientasi pencapaian, daya saing individual, atau perhitungan rasional. Elemen-elemen kunci dari budaya masyarakat adalah aktivitas politik, kesiapan dalam berpartisipasi, perhatian dengan isu-isu publik, peraturan hukum, disiplin, menghormati pesaing, dan menerima dengan mayoritas. Budaya diskursif termasuk toleransi, keterbukaan pikiran, penerimaan keberagaman dan pluralisme, skeptisisme, kritik, dan lain-lain. Seperti budaya harian, yang terutama adalah kebersihan, ketertiban, ketepatan waktu, perawatan kesehatan, kebugaran, dan fasilitas lain yang bisa dinikmati.⁶¹

Dari ungkapan Sztompka di atas dapat menginspirasi bahwa peradaban dapat dibangun melalui interkoneksi antar masyarakat yang kooperatif dan komplementer dalam menjalankan peran dan tugasnya dengan kapasitas masing-masing. Tidak perlu ada strata siapa yang lebih unggul daripada yang lain dalam membangun negeri, karena setiap individu memiliki keistimewaan dan perannya masing-masing. Demikian pun, Islam mengajarkan berdiri sama tinggi, dan duduk sama rendah, satu kelompok tidak merasa paling dibutuhkan, tetapi berdasarkan capaian prestasi kompetisinya [al-Ahqaf [46]:19.

61 Sztompka, P. C, *Mizational Competence: A Prerequisite of Post-Communist Transition*, (1993), available at: www.friends-partners.ru/newfriends/audem/audem92/Sztompka.html (Diakses: April 13, 2005).

E. Pola Komunikasi Teknologi dan Kecerdasan Kewargaan

Saat ini, dunia berada pada milenium di mana umat manusia menghadapi berbagai masalah (krisis ekonomi global, bencana alam, polusi, pemanasan global). Manusia dihadapkan pada kebutuhan dan keharusan untuk berkomunikasi guna membangun hubungan. Saat ini, infrastruktur informasi dan komunikasi sedang dikembangkan. Para peneliti banyak melakukan riset tentang pola bahasa yang dapat mempengaruhi komunikasi di masa depan dengan menciptakan sistem komunikasi media terbaru.

Dalam tulisannya Sandina Ilie dan Oana Ilie, telah menyoroti pentingnya komunikasi dalam membentuk pola bahasa sosial dan mempresentasikan beberapa contoh pola umum yang digunakan dalam bahasa keseharian. Para ahli dalam banyak penelitiannya mengidentifikasi pola komunikasi dan informasi yang menginspirasi untuk membuat model media dan komunikasi baru yang mampu memperkaya kecerdasan kewargaan. Pola komunikasi mempertimbangkan sistem komunikasi yang mendukung kemajuan individu, sosial masyarakat dan perkembangan ekonomi. Sistem ini sering ditargetkan karena lebih terfokus pada kebutuhan manusia, lebih demokratis, lebih adil dan inklusif.⁶²

Perkembangan teknologi internet membentuk dunia baru dalam tatanan masyarakat saat ini dan secara tidak langsung mengubah pola kehidupan masyarakat. Perubahan ini tentu saja menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan yang bertujuan mengatur dan melindungi masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi.⁶³ Media daring memiliki peran penting dalam penyebaran berita *hoax* yang berkembang dalam masyarakat. Di Indonesia, berdasarkan survei yang dilakukan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan yang fokus terhadap telekomunikasi Indonesia mengemukakan, bentuk *hoax* yang paling sering diterima berupa tulisan sebesar 62,10%, gambar 37,50%, dan video sebanyak 0,40%.⁶⁴

⁶² Sandina Ilie, dan Oana Ilie, *Communication Patterns in Society and Civic Intelligence.....*, h. 221-228.

⁶³ Dewi Maria Herawati, *Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat*, Jakarta Universitas 17 Agustus 1945, Promedia, Volume II, No 2, 2016, h. 147.

⁶⁴ Dewi Maria Herawati, *Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat...*, h. 143

Salah satu hal yang perlu menjadi konsen bersama setiap elemen bangsa Indonesia terkait pola bahasa di tengah-tengah masyarakat adalah “*hate speech*”, yang saat ini menjadi hal yang banyak ditemukan dalam komunikasi masyarakat, baik dalam komunikasi secara langsung maupun dalam adu pernyataan di media sosial. *Hate speech* dilarang bukan untuk membungkam masyarakat, namun sebagai upaya pemerintah agar gaya komunikasi antar masyarakat menjadi lebih produktif dengan kritik yang konstruktif.

Kebijakan pemerintah seperti larangan menyampaikan pidato yang mengandung unsur kebencian di Amerika misalnya, diarahkan terhadap ras yang kurang kuat, etnis, atau jenis kelamin. Untuk mengatasi permasalahan *hate speech* ini menurut Pilgrim, kecerdasan kewargaan sangat diperlukan bagi masyarakat dan bagi pemerintahan itu sendiri.⁶⁵

Dukungan dari pengembangan teknologi *Information Communication and Technology* (ICT) sudah menjadi suatu keniscayaan di era digital seperti sekarang ini. ICT, memainkan peran penting dalam reformasi manajemen publik, seperti layanan publik yang lebih baik dengan waktu tunggu dan biaya lebih sedikit, membantu masyarakat mencari lapangan pekerjaan, dan memfasilitasi keterlibatan publik dalam membantu pemberdayaan masyarakat. Singkatnya, ICT mampu meningkatkan produktivitas publik, mendukung tata kelola serta meningkatkan akuntabilitas pemerintahan.⁶⁶

Information Communication Technology (ICT), dalam bahasa Indonesia dikenal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menjadi kebutuhan hidup manusia modern yang mempermudah segala kebutuhan manusia terkait informasi dan komunikasi yang sangat menantang dan mengubah banyak hal termasuk arsitektur pemerintahan dan budaya.⁶⁷ Di sisi lain

65 Tim A Pilgrim, Giving Oral Expression 'Free Rein': Implications for Diversity of University Hate Speech Codes, *Ethnic Studies Review*, Bellingham Vol. 20, (Apr 30, 1997): 25.

66 Dong Chul Shim and Tae Ho Eom, Anticorruption effects of information communication and technology (ICT) and social capital, *International Review of Administrative Sciences*, <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0020852308099508> diakses pada tanggal, 5 April 2019.

67 Wallace J. Taylor, Stewart Marshall, Shahram Amiri, The e-evolution of the i-society in the delivery of e-government, *AI & Soc* (2010) 25:359–368, Lihat juga: Bollier D The Rise of Netpolitik: How the Internet is changing international politics and diplomacy. A report to the 11th annual Aspen Institute roundtable on Information Technology. Washington, DC. Aspen Institute (2003). ISBN 0 89843368 1. <http://216.181.117.89/index.asp?bid=1290>.

secara efektif ICT secara tidak langsung sangat berperan menumbuhkan kembangkan kecerdasan kewargaan. Dengan kemajuan ICT interaksi bermasyarakat akan banyak berubah dan perubahan itu menuntut pada kecerdasan warga negara dalam berbangsa dan bernegara. Hermes menyatakan “.. *ICTs do not necessarily produce new citizens but that they do provided for new and important citizenship practice*,⁶⁸ (ICT tidak sekedar menghasilkan warga negara baru tetapi ICT menyediakan hal yang baru dan penting bagi praktik kewarganegaraan). Hubungannya antara ICT dan pembentukan kecerdasan kewargaan, karena ICT digunakan sebagai instrumen penyebar informasi yang dapat mempengaruhi pola komunikasi, pola pikir dan pola interaksi masyarakat itu sendiri.

Schuler menyatakan bahwa permasalahan di lingkungan sosial dapat diselesaikan salah satunya dengan membangun kecerdasan sosial. Dalam tulisannya Schuler yang mengeksplorasi hubungan antara jaringan komunitas dan konsep kecerdasan warga negara dari masyarakat yang baru lahir. Ini karena menurutnya, kecerdasan kewargaan menggambarkan kapasitas masyarakat untuk secara sadar beradaptasi dengan lingkungannya dan membentuk lingkungan masa depan yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Meskipun individu berkontribusi pada kecerdasan kewargaan, tetapi konsepnya menggambarkan fenomena yang bersifat kolektif. Schuler berpendapat bahwa jaringan komunitas adalah manifestasi penting dari kecerdasan kewargaan di masa awal revolusi internet. Teori kecerdasan kewarganegaraan dapat digunakan sebagai resep dari proses terjadinya penurunan pengaruh jaringan komunitas tradisional menuju peningkatan vitalitas dan pengaruh jaringan komunitas di masa depan.⁶⁹

diakses 7 Mar 2004; Coleman S, Gotze J (2002) Bowling together: online public engagement in policy deliberation. <http://www.bowlingtogether.net/about.html>. Diakses Maret 2004; Rheingold H, Smart Mobs: the Next Social Revolution. (Perseus Publications, Cambridge, MA2002), ISBN 0738206083, dan Ward M, “What the net did next”. BBC News (2004). 1st January. <http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/technology/3292043.stm>. Diakses Maret 2004.

68 Hermes, J. (2006) Citizenship in the Age of the Internet. *European Journal of Communication*. Vol 21:page 295-309 (diakses 22 September 2018).

69 Schuler, Douglas Community networks and the evolution of civic intelligence, *AI & Society*; *London* Vol. 25, Iss. 3, (Aug 2010): 291-307. DOI:10.1007/s00146-009-0260-z. lihat juga: Fiorella de Cindio dan Laura Anna Ripamonti, *Nature and roles for community networks in the information Society*, *AI & Soc* (2010) 25:265–278.

Lebih lanjut Schuler mengemukakan kecerdasan kewargaan dapat muncul dari gagasan kompetensi peradaban tentang budaya, termasuk budaya dalam menggunakan teknologi informasi. Keterampilan dan kompetensi tertentu perlu diperoleh sebagai bagian dari transisi banyak negara menuju tipe masyarakat baru.⁷⁰ Komunikasi dan informasi adalah salah satu kunci terbangunnya kecerdasan kewargaan, dan tentu merupakan yang paling penting untuk mengajak setiap orang berpartisipasi dan terlibat dalam aktivitas sosial.⁷¹ Kehadiran masyarakat baru yang juga akan memunculkan persoalan baru membutuhkan pemecahan di semua level dengan cara yang lebih baik.

Ungkapan senada juga ditulis oleh Katia Passerini dan Dezhi Wu, terkait dinamika tren kolaborasi di tengah masyarakat yang secara masif menggunakan ICT dalam komunitas mereka. Dengan ICT, kolaborasi mereka menjadi tidak terbatas dan keterikatan mereka satu sama lain telah menumbuhkan apa yang mereka sebut dengan *intelligent communities* atau masyarakat yang cerdas, yang secara makna juga memiliki kesamaan yang tidak jauh berbeda dengan kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*).⁷² Kolaborasi menggunakan ICT tersebut dapat mempercepat penerimaan informasi antar masyarakat meski jarak yang berjauhan, sehingga tindakan individu atau kelompok di suatu tempat berada dalam pantauan individu atau kelompok lainnya.

Hal menarik lainnya tentang keterkaitan ICT dalam membentuk interaksi masyarakat menurut Peter Day, teknologi sebagai struktur sosial membawa sebuah konsekuensi bahwa pertumbuhan informasi dan era digital di masyarakat, secara khusus mampu memberikan pelayanan produksi hiburan yang menarik, ideal dan aspiratif dari berbagai kultural dan komunitas dalam sebuah masyarakat yang demokratis.⁷³ Televisi misalnya,

70 Schuler, D. "Cultivating society's civic intelligence: patterns for a new world brain", *Journal of Information, Communication and Society*, (2001), Vol. 4 No. 2, p. 157-81.

71 Hal ini diamini juga oleh: Sandina Ilie, dan Oana Ilie, Ilie, *Communication Patterns in Society and Civic Intelligence.....*, h. 221-228.

72 Katia Passerini and Dezhi Wu, The new dimensions of collaboration: mega and intelligent communities, ICT and wellbeing, *Journal of Knowledge Management*, Vol. 12 No. 5 2008, pp. 79-90, Q Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1367-3270. Bandingkan dengan: Benninger, Christopher Charles, Principles of intelligent urbanism: The case of the new Capital Plan for Bhutan, *Ekistics*; Jan-Jun 2002; 69, 412-414; ProQuest, pg. 60

73 Peter Day, A brief introduction to the history of community informatics, *AI & Soc* (2010) 25:259-263.

sebagai media komunikasi yang bisa diakses siapa saja dan kapan saja jelas bukan hanya sebagai alat untuk hiburan semata. Ada peran strategis pertelevisian yang harus disadari memberi efek positif dan negatif bagi masyarakat, tergantung kepada jenis siaran yang ditampilkan. Tayangan program televisi masih perlu mendapat perhatian terkait dengan program yang juga dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai bagian utama dari tanggung jawab warga negara yang cerdas.

Proses menanamkan kecerdasan kewargaan kepada warga negara membutuhkan kerja keras, terutama bagi negara dengan jumlah penduduknya besar seperti Indonesia. Proses *state building, nation building, dan government building* bangsa Indonesia dengan warga negara yang paling majemuk berpenduduk 230 juta, merupakan tambahan pekerjaan rumah tersendiri, dan menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk pemilik dan para pengguna media komunikasi dan informasi. Selain pada penggunaannya, ternyata secara politik Indonesia dijadikan target operasi dunia global untuk menanamkan pengaruh negatif dari media komunikasi dan informasi. Konten media bukan hanya menjadi tontonan, tetapi harus menjadi tuntunan bagi pembentukan karakter bangsa yang bermoral dan bermartabat, sekaligus menjadi jembatan penghubung interaksi pemerintah dengan warga negara secara optimal.⁷⁴

Menutup pembahasan pada diskursus tentang kecerdasan kewargaan yang telah dibahas di atas, dapat digaris bawahi integrasi seluruh elemen bangsa dalam membangun peradaban masyarakat yang progresif dan konstruktif, dapat dilakukan salah satunya melalui menumbuhkan kecerdasan kewargaan bagi masyarakat. Ini agar kecintaan masyarakat kepada negara diiringi dengan kemampuan menganalisis, memahami dan mengambil aksi positif dalam memecahkan permasalahan ataupun dalam menjalin relasi harmonis di tengah-tengah masyarakat.

Pemerintah, swasta, para akademisi dan orang tua harus mengambil peran strategis dalam mempersiapkan generasi, selain melek informasi juga memiliki kemampuan membangun komunikasi yang baik, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial, agar mereka menjadi tunas harapan

⁷⁴ Atie Rachmiatic, "Membangun Kecerdasan Informasi Dalam Peneguhan Karakter Bangsa", *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. 01 (02), 2016. 114-121, E-ISSN: 2503-0795, h.115.

pemimpin masa depan, mampu melanjutkan estafet perjuangan serta cita-cita pendahulunya untuk membangun negara yang lebih mandiri dan sukses dalam berbagai bidang.

F. Isyarat Al-Qur'an tentang Kecerdasan Kewargaan

Konsep dan rumusan kecerdasan kewargaan yang dikemukakan para ahli di atas secara umum substansi pernyataannya adalah, bagaimana membangun manusia dari kedirian individu menuju kedirian publik yang merupakan jati diri yang sebenarnya, yaitu makhluk sosial. Berbicara kecerdasan kewargaan berarti berbicara tentang sejauh mana seseorang mampu memperluas wilayah ruang sosial dan konektifitas kolektifnya. Wilayah ruang sosial, yaitu keluarga, warga lingkungan, warga dalam berbangsa bernegara dan bahkan warga dalam dunia global. Kecerdasan memberikan peranan yang sangat penting untuk mengorbitkan eksistensi manusia sebagai khalifah, menguasai dunia, mengembangkan sosial, memelihara alam untuk perlindungan diri, bahkan destinasi kehidupannya.

Lalu bagaimana rumusan kecerdasan kewargaan dalam al-Qur'an?. Kekhalifahan adalah tugas sosial yang diamanatkan Tuhan kepada manusia pertama, Adam, (al-Baqarah [2]: 30). Sebelum menjalankan tugas di bumi, Tuhan membekali Adam dengan wawasan kecerdasan kewargaan (*ta'lim*) supaya memahami, beradaptasi dan berinteraksi dengan beragam struktur organisasi kehidupan dari makhluk terkecil hingga terbesar, yang diistilahkan al-Qur'an sebagai identitas seluruh lapisan struktur kehidupan, *al-asmā* (al-Baqarah [2]: 34) yaitu *asmā al-khalq*,⁷⁵. Untuk memudahkan berkomunikasi dan interaksi, Adam dibekali dengan kemampuan berbahasa. Karena itu, sebagian *mufassir* memaknai *asmā* dalam arti penguasaan banyak bahasa.⁷⁶ Tugas ini menuntut Adam, dan manusia secara keseluruhan untuk aktif dan kreatif dengan lingkungannya dalam meraih perkembangan yang lebih tinggi. Bahasa menjadi jembatan yang paling cepat untuk menghubungkan individu dengan individu lain atau kelompoknya, bangsa satu dengan bangsa lainnya, warga negara di suatu negara dengan negara lainnya. Dengan bahasa manusia

⁷⁵ Abi 'Ubaidah Ma'mar ibn Mutsanna al-Taimī, *Majāz al-Qur'an*, Kairo: Maktabah al-Khanij³, tth, Juz:1, h. 36.

⁷⁶ Abi Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Bagawī, *Ma'ālim al-Tanzīl*, ditahqiq: Muhammad Abdullah al-Namr, et.al, Riyadh: Dār al-Thayyibah, 1409 H, jilid: 1, h. 80.

seakan tidak tersekat ruang, sebaliknya keterbatasan dalam berbahasa manusia berada dalam ruang yang sempit. Kondisi ini searah dengan ungkapan Wittgeinstein “Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner welt ‘*batas bahasaku adalah batas duniaku*’.”⁷⁷ Dalam Islam, Ras dengan segala jenisnya bukan benteng pembatas manusia untuk saling mendukung (*ta’a3ruf*) dalam kreativitas performa terbaiknya (al-Hujurat [49]:13).

Tidak berhenti pada Adam, selanjutnya tugas kekhalifahan secara estafet dipikul anak cucunya. Capaian prestasi (*darajāt*) yang diperoleh oleh masing-masing mereka tentu tidak sama, ada yang tinggi dan juga yang rendah tergantung kesungguhan dan keseriusan mereka dalam melaksanakan kekhalifahan [al-An’am[6]:165. Kompetisi yang dilakoni secara bersama tidak selalu menghasilkan capaian yang sama, tetapi ukurannya adalah kerja keras untuk mendapatkan hasil gemilang [al-Ahqaf [46]:19.

Dua ayat di atas mengajarkan tentang masyarakat yang kompetitif dan berdaya saing sehat, dan ini menjadi ciri warga negara yang cerdas. Kecerdasan kewargaan tidak menuntut semua warga negara berprofesi sama, melakukan aktivitas sama, berideologi sama, tetapi dalam perbedaan tersebut bertujuan mendukung cita-cita bersama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari 6 (enam) indikator orientasi kecerdasan kewargaan yang dirangkum dari para ahli di atas, tidak satu pun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dari sumber ajaran Islam, al-Qur’an-Hadis, banyak ditemukan pernyataan yang spiritnya berorientasi pada kecerdasan kewargaan, seperti keharusan membangun relasi harmonis dan anti ideologi rasisme [al-Hujurat[49]:13], bersatu padu dalam mengusung kebaikan sesuai kapasitas yang dimiliki [al-Nisa [4]:85, al-Taubah [9]:71, [al-Maidah[5]:2], Hud [11]:23, al-Isra[17]:84], berjiwa sosial [al-Baqarah [2]:83, al-Nisa [4]:36], pemberdayaan masyarakat berupa kepedulian pada orang lemah (miskin, du’afa’ yatim) [al-Taubah[9]:60, al-Ma’un[7]:1-4], menyiapkan generasi yang berkualitas [al-Nisa[4]:9, al-Furqan [25]:74, al-Anfal [8]:29, al-Tahrim [66]:6, al-Shafat [37]:100], bersinergi dengan zaman [Ali Imran[3]:140, al-Ra’d []:11], al-Anfal [8]:53] dan ramah lingkungan sehingga tidak memicu bencana alam maupun bencana kemanusiaan [Hud [11]: 100, 102, 117, a;-Anfal [8]:25, al-

⁷⁷ Agus Setyonegoro, Bahasa, Pikiran, Dan Realitas Merupakan Kesatuan Sistem Yang Tidak Dapat Dipisahkan, Jurnal Pena, Vol 2, Desember 2013, ISSN 2089-3973, h. 64.

Rum [30]:41, al-Syura [42]:30, al-Maidah [5]:32, al-Qashash [28]:77, al-Baqarah[2]:195.

Perbaikan sosial dalam kemanusiaan diistilahkan al-Qur'an dengan *islāh bain al-nās* [al-Nisa [4]:114. Konsolidasi internal keluarga [al-Baqarah[2]:228, al-Nisa[4]:35] atau konsolidasi sosial masyarakat atau warga negara pada wilayah, bangsa dan negara tertentu dapat dimaknai juga sebagai *islāh* [Hud [11]:117, al-Hujurat[49]:9 dan 10]. Sedangkan perbaikan sosial dalam lingkungan hidup dan alam diistilahkan dengan *islāh fī al-ardh* [al-‘Araf[7]:56, 85.

Para pegiat dan aktifis sosial disebut al-Qur'an sebagai *muslih*, jamaknya *muslihūn*, dan sebaliknya orang yang suka menyulut konflik sosial, membuat keresahan di masyarakat dan perusak alam disebut sebagai *mufsid*, jamaknya *mufsidūn* [al-Baqarah [2]:11, 220, Hud[11]:117]. Dalam bentuk apapun kegiatan, baik yang berkaitan dengan kemanusiaan maupun pelestarian lingkungan, yang tidak terbatas jenisnya, selama memberikan efek positif dan sebagai upaya mewujudkan cita-cita bersama untuk meraih mimpi indah masyarakat maka dapat dikategorikan sebagai implementasi dari *islāh bain al-nās* dan *islāh al-ardh*.

Kedua bentuk islah ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kecerdasan kewargaan dapat terwujud jika seseorang atau suatu masyarakat secara bersamaan telah berusaha melaksanakan islah keduanya, dan sebaliknya kecerdasan kewargaan tidak bisa terwujud jika hanya salah satu dari dua islah yang dijalankan.

Untuk mampu melaksanakan islah, setiap individu yang menjadi warga masyarakat, harus terlebih dahulu membentuk karakter moral (*moral character*) kedirian individu yang disebut al-Qur'an dengan *ihsān al-nafs*, dan mengimplementasikan ke ruang publik atau moral ber-warganegara (*civic morality*), atau disebut *ihsān bi al-nās*. *Ihsān* dapat dimaknai sebagai bentuk moralisasi diri, lawan katanya demoralisasi (*isā'ah al-nafs*). Al-Qur'an menyatakan “*jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.*”(al-Isra[17]:7. Pada ayat lain ada perintah ihsan berwarganegara, dan ihsan kepada lingkungan hidup dengan tidak merusak alam “*berperilaku baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berlaku baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di di bumi.*

Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” [al-Qashash[28]:77.

Ihsan bi al-nas, keluarga harus menjadi fokus pertama dalam pembentukan moral berwarganegara. Pembentukan karakter berwarganegara ditentukan oleh elemen masyarakat kecil, yaitu keluarga. Ihsan berwarganegara secara terstruktur harus terus diperluas kepada masyarakat yang paling dekat secara hubungan biologis (*dzi al-qurbā*), masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan (*al-yatāmā wa al-masāk³n*), masyarakat yang berdekatan dan berjauhan secara pemukiman (*al-jār al-qurbā wa al-jār al-junub*), kawan yang paling dipercaya (*al-shāhib bil janb*), para imigran atau petualang dalam kebajikan (*ibn al-sab³i*) dan kelompok yang tersandra secara sosial dan politik [alNisa[4]:36].⁷⁸

Al-Jār ketika dimaknai lebih luas dapat berarti tetangga yang bermukim dalam kawasan pemukiman atau negara yang sama (*al-jār al-qurbā*). Sedangkan tetangga jauh (*al-jār al-junub*) adalah warga negara yang berbeda negara, negara tetangga. Krisis kemanusiaan seperti kemiskinan yang menimpa banyak manusia di berbagai negara dan banyaknya anak yatim terlantar akibat perang harus menjadi perhatian warga dunia, terutama negara-negara yang bertetangga. Perang sering kali lebih banyak memproduksi kemiskinan, anak yatim dan eksodus imigran dibanding memecahkan masalah kemanusiaan. *Al-shāhib bi al-janb*, dapat dimaknai sebagai “*negara sahabat*” yang hadir untuk membantu dikala sulit dan membela di saat yang lain memusuhi dan menjauhi.

Redaksi yang disusun dalam al-Qur’an surat al-Nisa ayat: 36 menjelaskan bagaimana seseorang membangun kecerdasan kewargaan yang terimplementasi dari struktur masyarakat terkecil selanjutnya diperlebar kepada struktur yang lebih besar, yaitu masyarakat. Pembentukan karakter diri yang mampu diaktualisasikan pada moral berwarganegara sebagai sesuatu yang fundamental dalam pengembangan kecerdasan kewargaan. Merusak alam dan lingkungan sama artinya dengan melakukan demoralisasi diri. Sebaliknya, menjaga hubungan baik dengan orang lain dan menjaga kelestarian alam berarti telah menjaga kebaikan dirinya dan orang lain, serta menjaga secara bersama ketidakbaikan yang diakibatkan oleh alam.

⁷⁸ Abu al-Q[±]sim Mahmūd ibn Umar al-Jamaksyari, *al-Kasyaf*, Riyadh : Maktabah al-‘Ubaikan, 1998, Jilid: 2, h. 73

Spirit *islāh bain al-nās* dan *ihsan bi al-nās* hakikatnya adalah memaksimalkan pemberdayaan diri sendiri dan pada orang lain. Antara dirinya dan orang lain terdapat jembatan kemanusiaan (*habl min an-anās*) yang harus dirawat supaya tidak putus. Ketika jembatan penghubung terputus, maka sama artinya memutus peradaban manusia yang hidup pada suatu wilayah tertentu, karena ia akan terisolir dari dunia luar, sehingga tetap dalam kondisi terbelakang dan jauh dari kemajuan. Keterbelakangan secara sosial dan peradaban memosisikan manusia berada dalam kehidupan dunia yang termarginalkan (*al-dzillah*) dan terhimpit kesulitan (*al-maskanah*) dalam derasnya zaman yang cepat berubah. Merawat jembatan kemanusiaan substansinya adalah merawat jembatan ketuhanan (*habl min Allah*)[Imran[3]:112.



BAB III:

MULTIKULTURALISME DAN KECERDASAN KEWARGAAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ini karena sejak proses terbentuk dan terlahirnya ke dunia, manusia telah melalui serangkaian proses yang tidak dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang tua, ia tumbuh dan berkembang bersama guru dan teman-temannya di sekolah, untuk belajar bersama demi mempersiapkan diri dengan seperangkat potensi yang dapat mengantarkannya menjadi manusia yang bermanfaat. Dalam kebersamaannya bersama orang-orang di sekitarnya, manusia juga perlu belajar bagaimana ia menjadi pelajar yang dapat berinteraksi harmonis dengan sesama manusia.

Dalam agama Islam sendiri, Rasulullah hadir untuk menyerukan kepada umat manusia akan pentingnya proses belajar menjadikan perhatian utama. Ini karena dari hasil proses belajar mengajar, manusia dapat mengetahui sesuatu menjadi lebih jelas dan dapat menemukan kebenaran yang dapat menjadi pedoman hidup yang manusia jalani. Surat al-‘Alaq 1-5 menjadi bukti perhatian al-Qur’an terhadap pentingnya belajar untuk dapat

memahami segala yang terhampar di alam raya, sedapat yang bisa dipahami oleh manusia.¹

Sebab itu, untuk mengasah potensi yang dimiliki dan menjadi orang yang *expert* atau profesional dalam bidang yang digeluti, Rasulullah menyeru kepada umatnya untuk belajar. Rasulullah jelas mengingatkan kepada umat Islam bahwa: “*menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim.*” Redaksi hadis yang dimaksud adalah:

حدثنا هشام بن عمار حدثنا حفص بن سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (طلب العلم فريضة على كل مسلم . وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذهب) .

*Hisyam ibn Umar menceritakan kepada kami, menceritakan kepada kami Hafshah ibn Sulaiman, menceritakan kepada kami Katsir ibn Syinzhir dari Muhammad ibn Sirin dari Anas ibn Malik, dia berkata Rasulullah Saw bersabda, menuntut ilmu wajib bagi setiap umat muslim. Mempercayakan ilmu pada bukan ahlinya, seperti memakaikan kalung perhiasan berharga dengan permata kepada seekor babi”.*²

Belajar menjadi cara terbaik agar seseorang dapat mengoptimalkan potensinya, pendidikan dapat membentuk generasi-generasi emas yang profesional dengan kecenderungan dan bakat masing-masing. Proses pendidikan juga harus didukung oleh guru yang profesional, sebagaimana Rasulullah mencontohkan sebagai sosok guru yang profesional dan mencetak para sahabat yang menoreh tinta emas dalam sejarah perkembangan Islam.³

Agama Islam juga pertama kali lahir di Mekkah, di mana kondisi sosial budaya masyarakat yang sangat beragam terutama sentimen kesukuan yang sangat kental, justru mampu dipahami oleh Rasulullah dalam membuat strategi dakwah supaya dapat diterima masyarakat. Di Madinah

¹ Mengenai penafsiran ini, lihat dalam Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, vol. 15, h. 392-396.

² Lihat: Muḥammad Ibn Yazīd Abū ‘Abdillāh al-Quzwainī, Sunan Ibn Mājah (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), Bāb: Faḍl al-‘Ulamā’ wa al-Ḥaṭhṭh ‘alā Ṭalab al-‘Ilm, juz. I, 81. CD room, Maktabah al-Shāmilah.

³ Tarmizi A Karim, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif al-Qur’an dan Implementasinya di dalam Masyarakat Indonesia*, Tangerang Selatan: Young Progressive Muslim, 2018, h. 243.

multikulturalisme menjadi lebih beragam, bukan hanya sentimen kesukuan yang harus diselesaikan tetapi juga keragaman agama, selain Islam di sini juga ada Yahudi dan Nasrani. Perjuangan Rasulullah selama 13 tahun di Mekkah dan 12 tahun di Madinah, diwarnai berbagai peristiwa yang pada gilirannya berbuah manis, dengan sukses tersebarnya Islam dan ajarannya yang dapat diterima oleh berbagai macam suku dan budaya masyarakat Arab saat itu.

Ajaran tentang menghormati segala macam bentuk perbedaan bukan hal baru dalam Islam. Karena sejak lahirnya, Islam dan Muhammad Saw diibaratkan pasangan sejoli yang sangat indah ketika dilihat dan menebarkan kebahagiaan kepada siapa pun yang mendekatinya. Islam adalah anugerah Allah (*fadh Allah*) dan Muhammad adalah penebar rahmat sepanjang masa. Tafsiran lain kata anugerah dan rahmat pada (QS:10:58) di antaranya ilmu dan al-Qur'an, dan al-Sunnah, taufik dan penjagaan.⁴

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: *Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"* (Yunus [10]:58.)

A. Pemaknaan Multikulturalisme

Peristiwa konflik yang terjadi di Indonesia sering kali mengarah pada tudingan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menjadi hulunya. Padahal banyak sekali faktor lain yang memicu terjadinya konflik seperti politik, sosial, budaya ataupun ekonomi. Konflik yang terjadi, acapkali lahir dari masyarakat yang beragam. Masyarakat yang plural, sering kali tidak dapat menyelesaikan hal yang diinginkan secara bersama. Usaha mendamaikan inilah yang kemudian diadaptasi dengan model multikulturalisme.

Keprihatinan terhadap maraknya kekerasan, konflik, dan perpecahan menjadi alasan utama terhadap munculnya gagasan pemahaman multikultural. Pemahaman yang baik atas multikultural belum dapat

⁴ Abi Al-Faraj Jamaluddin, *Zād al-Musīr fī ilm al-Tafsīr* (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1984) Juz-4 h.40.

sepenuhnya meredam konflik, tetapi kecerdasan kewargaan menjadi kunci yang paling efektif sebagai solusi di wilayah yang multikultural.

Agama menjadi isu hangat yang dieksploitasi untuk mempertajam konflik. Sebagai contoh, isu penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama mendapat tempat khusus di media-media nasional. Dampaknya adalah masyarakat terinternalisasi secara otomatis sikap *outgroup* dan *ingroup* di dalam diri mereka. Sikap tersebut sekilas sah dan tidak terdapat persoalan yang mengkhawatirkan. Namun, sesungguhnya terdapat persoalan mendasar dalam nalar masyarakat tentang pemahaman serta pemaknaan nilai-nilai kebangsaan dengan melibatkan tema agama.

Di sinilah perlu untuk menyadarkan diri dalam kesadaran berbangsa. Haryatmoko menyebut kunci persoalan terletak pada "*tidak bisa menerima yang berbeda*". Ia menyebut bahwa konflik antar agama, terutama antara Islam dan Kristen di Indonesia pada dasarnya tidak lepas dari kebencian dan itu memang sungguh ada dan dirasakan. Tentu problem ini memiliki signifikansi yang memadai, apalagi jika melihat kenyataan maraknya ujaran kebencian yang dimunculkan masyarakat melalui media sosial.

Dari beberapa referensi yang ada, konsep pendidikan multikultural muncul sebagai solusi atas terjadinya berbagai peristiwa sosial yang mengkhawatirkan keamanan antar manusia seperti kekerasan, konflik, dan perpecahan. Berbagai peristiwa kekerasan, konflik dan perpecahan di Indonesia sendiri telah menjadi deretan berita yang cukup memilukan. Kasus seperti kekerasan terhadap etnis China di Jakarta pada Mei 1998, perang Islam-Kristen di Maluku Utara tahun 1999-2003, dan perang etnis antara warga Dayak dan Madura sejak tahun 1999 hingga tahun 2000 telah menyebabkan kurang lebih 2000 nyawa manusia melayang sia-sia.⁵ Beberapa tokoh kemudian mencari sebab yang menjadi persoalan utama terjadinya kekerasan tersebut. Prasangka dan stereotip yang cenderung menghasilkan pemahaman negatif menurut Ainul Yaqin menjadi faktor munculnya sikap tidak toleran baik antar individu maupun kelompok dan dalam persoalan agama, sosial maupun konflik pribadi.⁶ Selanjutnya hampir semua sepakat bahwa terjadinya kekerasan tersebut dikarenakan tidak adanya rasa toleransi di antara mereka. Selain itu, kondisi majemuk yang ada di Indonesia ditambah semakin majunya teknologi informasi juga sedikit banyak

⁵ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 4.

⁶ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural*,... h. 16.

berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan jika sikap saling menghormati menipis.

Multikultural berasal dari dua kata dasar “multi” dan “kultur”. Multikultural sendiri dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti keberagaman budaya.⁷ Multikultural sebagai bentuk gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan. Secara bahasa multikultural dapat diartikan sebagai keragaman budaya. Pengertian yang sama juga diutarakan oleh Ngainum Na'im, multikultural berarti keragaman budaya.⁸ Sedangkan Lawrence mengartikan multikultural sebagai suatu pemahaman, penghargaan, serta penilaian atas budaya seseorang serta suatu penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.⁹

Menurut Azyumardi Azra, multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia, atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebhinnekaan, pluralitas, sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial- budaya, dan politik yang mereka anut.¹⁰

Pemaknaan penting dari beragam definisi di atas lebih pada fungsi dan tujuannya, bahwa multikulturalisme berusaha untuk menyatukan berbagai golongan atau kelompok dari beragam budaya, etnis, warna kulit, bahasa, dan agama dalam bingkai kesatuan dan persatuan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang dimuat dalam Pancasila memiliki semangat yang sama dan sesuai dengan tujuan dan fungsi multikulturalisme dan menjunjung tinggi nilai perbedaan. Semangat kolektifitas untuk meraih cita-cita bersama tidak mungkin tercapai hanya oleh satu kelompok yang sama, tetapi akan dapat lebih mudah dan indah hasilnya ketika dilibatkan seluruh elemen dari yang berbeda.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 937.

⁸ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural*, Yogyakarta: Arruz, 2008, h. 51.

⁹ Dikutip oleh Akhyar Yusuf Lubis, *Deskonstruksi Epistemologi Modern*, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2006, h. 174.

¹⁰ Azyumardi Azra, *Merawat Kemajuan Merawat Indonesia: Seri Orasi Budaya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, h.10.

Konsep multikulturalisme, adalah konsep masyarakat majemuk, seperti yang digambarkan oleh J. S. Furnivall, yang dikutip oleh Achmad Fedyani Saifuddin, bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang secara rasial berbeda dan bertemu di pasar-pasar.¹¹ Pasar sebagai salah satu pusat peradaban masyarakat tradisional maupun modern, tempat interaksi untuk bersama-sama menghasilkan keberuntungan secara ekonomi dan juga menikmati pertemuan budaya.

B. Pendidikan Multikulturalisme

Masyarakat Indonesia kini hidup di era globalisasi yang acap kali dipahami sebagai suatu kondisi yang mempengaruhi tata kehidupan secara menyeluruh, simultan dan berdampak *multiplayer effects*. Pengaruh globalisasi yang didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dan informasi telah merambah ke seluruh dunia dan menjamah setiap aspek kehidupan tanpa mengenal batas.¹² Dunia menyatu tanpa sekat laut dan daratan sehingga ruang dan waktu menjadi sempit.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi alat yang sangat efektif untuk memunculkan dampak, baik positif maupun negatif tergantung pada kepentingan penggunanya. Indonesia sebagai bangsa besar yang multikultural dan plural memiliki resistensi yang tinggi untuk terjadinya konflik sosial dari dampak negatif kemajuan komunikasi dan teknologi di era global. Sangat penting untuk warga negara Indonesia diberikan pendidikan kewargaan yang menjunjung tinggi nilai multikulturalisme. Sama dengan pluralitas, bahwa tidak ada alasan untuk menolak keniscayaan masyarakat multikultural. Menurut Tariq Ramdhan dalam tulisannya *What I Believe* yang dikutip Abd. Muid, tiga hal yang harus ditekankan pada masyarakat multikultural, yaitu; integrasi, kewarganegaraan dan

¹¹ Achmad Fedyani Saifuddin, "Multikulturalisme sebagai Solusi Atas Konflik-konflik Keagamaan di Indonesia", dalam *Islam dan Prospek Keberagaman di Indonesia*, Penulis Ali Nurdin dan Abd. Aziz Hasibuan, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, h. 113.

¹² Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. I, hal. 43, dalam Abudin Nata, *Pendidikan Islam di Era Global (Pendidikan Multikultural, Pendidikan Multi Iman, Pendidikan Agama, Moral dan Etika*, h. 246.

multikulturalisme. Untuk masyarakat seperti ini sangat penting dibangun konsep “kewargaan multikultural”.¹³

Hilda Hernandez dalam bukunya *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process and Content* sebagaimana dikutip oleh Muhiddinur Kamal, menjelaskan bahwa pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultural dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi dan lain-lain.¹⁴ Era globalisasi dengan segala permasalahannya kini tengah dihadapi oleh umat manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bangsa Indonesia perlu bersiap diri menghadapi permasalahan yang akan timbul dari era globalisasi ini. Tidak ada cara yang lebih efektif, kecuali melalui mempersiapkan generasi yang mampu mengembangkan sikap kecerdasan kewargaan.

Pendidikan multikultur bagi bangsa, khususnya generasi muda Indonesia adalah suatu keharusan sebagai penguat ikatan tali persaudaraan, *recognition cultural* demokratisasi, dan bagi masa depan bangsa Indonesia. Etnosentrisme etnik nusantara memberikan peluang besar untuk terbentuknya budaya secara eksklusif, sehingga terjadi sauinisme suku, agama, etnik, daerah secara berlebihan melupakan multikulturalisme (*supra cultur*) kehidupan bersama.¹⁵ Peran pendidikan adalah peran sentral, yang mampu membaca permasalahan dan kebutuhan dunia yang dijawab melalui mempersiapkan peserta didik dan masyarakat yang memiliki integrasi kecerdasan dalam dirinya. Kecerdasan dimaksud adalah kecerdasan kewargaan yang selalu adaptif dan responsif dengan setiap situasi dan kondisi zaman.

Dalam bukunya, H.A.R Tilaar menyatakan bahwa visi pendidikan ke depan adalah perlunya membangun bangsa dan negara Indonesia yang tangguh dan kokoh, kuat, bersatu, dan berwibawa dengan menjadikan

¹³ Abd. Muid N, *Islam VS Barat, Merajut Identitas yang Terkoyak*, Jakarta: Eurabia, 2013, h.231

¹⁴ Muhiddinur Kamal, *Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Indonesia Yang Majemuk*, Jurnal Al-Ta'lim, Jilid 1, Nomor 6 November 2013, h. 455.

¹⁵ I Made Pageh, *Multikulturalisme Dan Tantangannya Di Indonesia: Jejak Kesetaraan Etnis Dan Kultur*, Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, Vol. 3 No. 2 Tahun 2016, h. 122.

pendidikan multikultural sebagai basisnya.¹⁶ Pendidikan ini tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa dikembangkan sikap kecerdasan kewargaan karena pendidikan multikultural hanya bersifat pemahaman sedangkan kecerdasan kewargaan sebagai bentuk implementatifnya.

Menurut Melani Budianta sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata, pendidikan multikultural sebagai sebuah pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan secara holistik, meneliti kekurangan, mengevaluasi kegagalan dan perilaku diskriminatif dalam kegiatan pembelajaran. Pendidikan multikulturalisme didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan, sehingga menjelma menjadi suatu komitmen untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan setiap anak didik mencapai potensi maksimal sebagai pelajar dan sebagai pribadi yang aktif dan memiliki kepekaan sosial tinggi di tingkat lokal, nasional dan global.¹⁷

Dari definisi tentang pendidikan multikulturalisme yang diungkap di atas, dapat ditarik benang merah tentang urgensi pendidikan multikulturalisme dalam membangun kecerdasan kewargaan dalam perspektif al-Qur'an sebagaimana yang akan diungkapkan dalam kajian selanjutnya. Hal ini karena pendidikan multikulturalisme meniscayakan tentang transformasi pendidikan secara menyeluruh, membongkar kekurangan, kegagalan dan praktik-praktik diskriminatif yang juga memiliki kesamaan dengan tujuan digagasnya tentang kecerdasan kewargaan yang menekankan tentang kepedulian, tanggungjawab dan keadilan sosial serta persamaan hak dalam pendidikan dan kehidupan bermasyarakat.

Tantangan utama multikulturalisme Indonesia adalah munculnya gerakan radikalisme di atasnamakan Islam dalam berbagai bentuk, seperti teroris dan dominasi arus utama mayoritas sesungguhnya tantangan bangsa multikultural.¹⁸ Karena itu pendidikan multikulturalisme harus melalui berbagai pendekatan. Setidaknya ada 4 pendekatan dalam pendidikan

¹⁶ H. A. R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, dalam: Abudin Nata, *Pendidikan Islam di Era Global*, h. 250-251.

¹⁷ Melani Budianta, "Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gagasan Umum", *Jurnal Tsaqafah*, vol. 1, no. 2, 2003, hal. 13, dalam Abudin Nata, *Pendidikan Islam di Era Global*, h. 251.

¹⁸ Made Pageh, *Multikulturalisme dan Tantangannya di Indonesia: Jejak Kesetaraan Etnis dan Kultur*,...h. 122.

multikultural yang dikembangkan oleh beberapa negara, yaitu. pendidikan mengenai perbedaan kebudayaan, pendidikan mengenai perbedaan pemahaman kebudayaan, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan dan pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral.¹⁹

Indonesia sebelum kelahirannya menjadi sebuah negara telah diwarisi oleh nenek moyangnya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berisi penekanan pada pentingnya cita cita yang sama dan sekaligus kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Semboyan ini menjadi pegangan moral dalam meneguhkan pentingnya komitmen negara untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain tercapainya cita-cita kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia. Seperti cuplikan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, “ Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “ semua buat semua, satu buat semua, semua buat semua. Akar nasionalisme Indonesia sejak awal justru didasarkan pada tekad yang menekankan pada pentingnya cita cita bersama, di samping pengakuan sekaligus penghargaan pada perbedaan sebagai pengikat kebangsaan.²⁰

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi penting dari ideologi adalah membentuk identitas kelompok yang majemuk dan multikultural menjadi satu umat yang cinta kebaikan dan sebaliknya benci keburukan. Pancasila adalah *common platform* sekaligus rasionalitas publik di mana keberagaman dari budaya, agama, etnis dan ras bertemu dan di sana terbentuk suatu negara bangsa. Di dalam negara bangsa Indonesia identitas kedaerahan, identitas keagamaan semua merasa terwakili. Tidak berlaku yang namanya mayoritas minoritas atau superior inferior karena semua tertampung dengan sama. Demokrasi yang berlaku bukanlah demokrasi mayoritarian tetapi adalah demokrasi Pancasila.²¹

¹⁹ Dikutip dari dari tulisan Choirul Mahfud “Menggagas Pendidikan Multikultural” Muhiddinur Kamal, *Pendidikan Multikultural Bagi Masyarakat Indonesia Yang Majemuk...456.*

²⁰ Abd Mu'id Aris Shofa, *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila*, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057, h. 34-37

²¹ Abd Mu'id Aris Shofa, *Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia dalam Bingkai Pancasila... h. 38-39.*

Ideologi Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika yang menjunjung tinggi multikulturalisme dan kemajemukan, merupakan acuan utama bagi warga negara Indonesia untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kecerdasan kewargaan.

C. Relevansi Piagam Madinah dengan Pendidikan Multikulturalisme dan Kecerdasan Kewargaan

Keistimewaan metode dakwah yang dibawa Rasulullah adalah, melakukan beberapa upaya transformasi yang secara perlahan membawa perubahan ke arah yang lebih baik bagi setiap golongan, baik sebagai individu maupun kolektifitas masyarakat. Transformasi ini dilakukan dalam banyak hal, baik dari segi transformasi budaya, karakter manusia, pola interaksi manusia, sampai kepada transformasi bagaimana laki-laki dan perempuan dalam relasi gender pada masa itu. Peran sosial diberikan porsi yang cukup sesuai semangat zamannya saat itu.

Bentuk transformasi yang dilakukan Rasulullah dalam dakwah lainnya adalah mengubah budaya perang bangsa Arab saat itu menjadi budaya komunikasi dan negosiasi dalam memecahkan masalah. Diakui Michael Heart bahwa Rasulullah sebagai seorang yang sangat ahli dalam komunikasi dan negosiasi. Dengan keahliannya ini, Islam dapat tersebar dengan cara yang lebih cepat dan dapat diterima oleh banyak pihak.²² Piagam Madinah adalah sebagai bukti konkrit yang memuat kontrak sosial-politik, yang disepakati oleh Rasulullah dan elemen masyarakat yang ada di Madinah, serta menjadi konstitusi dalam pelaksanaan berbangsa di Madinah sehingga secara keseluruhan komponen masyarakatnya disebut sebagai *ummah*.

Piagam Madinah ini dapat menjadi inspiratif yang ideal bagi umat manusia di era modern. Ia berhasil membentuk masyarakat dengan segala macam perbedaan agama dan budaya untuk membuat kesepakatan bersama yang isinya saling melindungi dan mendukung apapun suku yang terikat perjanjian di dalamnya. Pelaksanaan pendidikan multikulturalisme juga dapat mengambil pola tersebut. Piagam Madinah memuat nilai-nilai untuk mengembangkan sikap kecerdasan kewargaan, dimana tanggung jawab

²² Michael Heart, *100 Tokoh Terkemukadi Dunia*. Lihat juga: *the Most Influential World Leaders of All Time*, edited by: Amy Mckenna, (New York: Britannica Educational Publishing, 2010), h. 52-54.

bersama kepada wilayah/negara Madinah bukan diserahkan kepada kaum muslimin tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat yang hidup di wilayah ini.

Menurut Muhammad Quraish Shihab, dalam 47 pasal rumusan Piagam Madinah, terlihat pengertian *ummat* di samping dapat mencakup umat yang memiliki persamaan agama, juga dapat dicakup oleh mereka yang berbeda agama, selama mereka memiliki persamaan tujuan. Di sini, kendati mereka berbeda, tetapi sama dalam hak dan kewajiban mereka. Penganiayaan harus dihindari, bahkan dienyahkan. Kepastian hukum harus ditegakkan walau terhadap anak kandung sendiri. Isi piagam tersebut mendahului rumusan kebebasan beragama dan hak-hak asasi yang dikenal abad modern ini. Dan dipastikan setiap pihak yang terlibat dalam piagam tersebut menerima dengan sepenuh hati dan pikiran dan melaksanakannya dalam kehidupan keseharian mereka.²³

Piagam Madinah di atas menjelaskan tentang ajaran toleransi, integrasi sosial dalam menjaga keamanan bersama dan penegakkan keadilan bagi setiap kaum yang ikut dalam perjanjian tersebut. Keamanan yang terjaga pada gilirannya dapat membuat masyarakat dapat beraktivitas dengan bebas sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.²⁴

Dari poin-poin dalam piagam Madinah di atas juga dapat dipahami bahwa terdapat poin-poin yang bertujuan untuk menanamkan pendidikan karakter publik untuk menunjang eksistensi dan kesuksesan bersama bagi segenap elemen masyarakat, sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Manusia harus menyadari tidak mungkin dapat hidup hanya dengan golongan yang sama dari segi agama, budaya, ideologi dan sebagainya. Untuk itu, kesepakatan bersama perlu digagas untuk menjamin keamanan, keadilan dan kesuksesan hidup bersama bagi setiap elemen masyarakat. Dan tidak akan ada sebuah bangsa yang kuat jika belum mampu menyatukan sesuatu yang berbeda dalam kolektifitas keummatan. Multikulturalisme tidak akan berarti jika tidak dibangun sikap kecerdasan kewargaan, sebaliknya kecerdasan kewargaan lahir dan berkembang dari sebuah keniscayaan serta realitas multikulturalime.

²³ Muhammad Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadits-Hadits*, Jakarta : Lentera Hati, 2011, h. 520.

²⁴ Tarmizi A Karim, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 249-261.

Rasulullah adalah orang yang sangat berempati dan tegas, segala bentuk pelanggaran bagi siapa pun oknum yang menyalahi kesepakatan, akan mendapatkan sanksi sesuai kesepakatan bersama. Hal ini juga patut ditiru oleh siapa pun orang yang mendapatkan tugas sesuai kapasitas dan bidangnya.

D. Perhatian Islam terhadap Multikulturalisme

Term multikulturalisme muncul sekitar abad ke-20, sebagai kelanjutan atas nilai pluralisme yang mengacu pada keragaman etnis, budaya dan keyakinan dalam suatu wilayah atau negara. Setidaknya ada tiga aspek yang harus menjadi perhatian dari multikulturalisme, yaitu: budaya, keragaman budaya dan cara khusus atau solusi mengantisipasi keanekaragaman tersebut.²⁵

Multikulturalisme adalah kesadaran akan keragaman dalam kehidupan. Kesadaran ini muncul dari pemahaman atas kenyataan bahwa kehidupan tidak hanya satu warna. Satu warna tidak menghasilkan suatu yang indah ketika tidak melihat warna-warni yang lainnya. Oleh karenanya, jika ditilik lebih dalam multikulturalisme mengakui keberagaman dan warna yang berbeda.

Multikulturalisme merupakan ideologi dan cara untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya sekaligus. Untuk memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia. Bangunan tersebut harus didiskusikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme, sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan serta mengusung ideologi ini. Isu-isu yang relevan untuk diangkat dan didiskusikan terkait multikulturalisme diantaranya adalah, demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, hak asasi manusia, hak budaya

²⁵ Okke KS Zaimar, Multikulturalisme di Eropa, Jurnal Kajian Wilayah Eropa, Vol. III, No.:3 tahun 2007.

komuniti, dan isu-isu lainnya, pada akhirnya dapat dibangun konsep-konsep besar sebagai rumah bersama dalam pemahaman dan implementasi.

Multikulturalisme menjadi acuan utama bagi terwujudnya masyarakat multikultural, karena konsep multikulturalisme melahirkan ideologi yang mengakui dan menjunjung tinggi perbedaan dalam kesetaraan baik secara individual maupun secara kolektifitas kebudayaan. Model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang terkecil terbentuk keindahan masyarakat lebih besar, sehingga ibarat mosaik tercetak dalam sebuah gambar dimana setiap warna dan ornamen menyatu membentuk keindahan yang satu sama lain saling tidak terpisahkan. Dengan demikian, multikulturalisme diperlukan dalam bentuk tata kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis meskipun terdiri dari beraneka ragam latar belakang kebudayaan.

Dalam konteks bangunan berbangsa dan bernegara, istilah multikultural ini telah membentuk menjadi suatu ideologi atau faham yang disebut multikulturalisme. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, hak asasi manusia, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Multikulturalisme bagi bangsa Indonesia sangat penting dengan banyak suku, budaya, bahasa dan agama. Tentu dengan hal ini bertujuan mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan 5 sila Pancasila.

Keberadaan multikulturalisme tentunya bertolak belakang dengan monokulturalisme dan asimilasi yang memang adanya kesatuan budaya secara normatif. Sedangkan asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara

mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru.²⁶

Masyarakat Indonesia memahami multikulturalisme sebagai keberagaman dengan berbagai macam budaya dan tradisi yang lahir atau terdapat di masyarakat manusia. Dengan demikian, maka multikulturalisme dipahami sebagai sistem bagi pengelolaan keragaman budaya dan tradisi dengan menekankan sikap saling menghormati dan terbuka terhadap perbedaan-perbedaan yang ada.

Keberagaman merupakan hal yang tidak bisa ditolak oleh siapa pun. keberagaman adalah keniscayaan yang ada di alam semesta. Keberagaman merupakan anugerah dan kasih sayang Allah bagi manusia. Melalui pemahaman multikulturalisme tersebut, maka setiap orang diajak untuk menghormati dan menghargai spektrum yang luas tentang kebudayaan, agama, komunitas etnik, jenis kelamin, serta kelompok-kelompok lainnya yang ada di dalam masyarakat. Ini berarti pula bahwa multikulturalisme selalu meniscayakan adanya toleransi yang tinggi terhadap pandangan dan ekspresi-ekspresi kebudayaan yang berbeda-beda itu.

Demikian juga dengan Islam, jika membaca sejarah dan peradaban yang dibangun, Islam berupaya membangun toleransi dan memahami keberagaman realitas telah banyak dilakukan oleh kaum muslim awal. Upaya-upaya tersebut tidak hanya dilakukan terhadap mereka yang berbeda keyakinan keagamaan, melainkan juga di antara kaum muslimin sendiri.

Upaya membangun kebersamaan dalam keberagaman dapat dilihat dari bagaimana usaha Harun al Rasyid mengumpulkan para cerdik pandai dari latar belakang penganut agama yang berbeda untuk menterjemahkan buku-buku karya Yunani kuno. Para cerdik pandai tersebut tidak hanya dari yang beragama Islam saja, akan tetapi terdapat pula cerdik pandai yang berasal dari agama Yahudi dan Nasrani.²⁷ Demi kemajuan negara para cendekiawan dilibatkan dalam proses upaya pencerdasan warga negara. Sikap yang patut ditiru oleh para pemangku kebijakan negara.

²⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Multikulturalisme>, diakses pada tanggal, 12 Desember 2019.

²⁷ Philip K.Hitty, *History of The Arabs*, Tenth Edition, (T.P: The Macmilland Press, 1974), 311-316

Sikap penerimaan atas keyakinan atas agama selain Islam, menunjukkan universal Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak dan mengakui adanya keragaman latar belakang budaya dan kemajemukan. Oleh karena itu, jika diresapi, multikultural *sunnatullah* yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Setiap orang akan menghadapi kemajemukan di mana pun dan dalam hal apapun.

Gambaran di atas, baik yang dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid, ataupun visi dari ajaran Islam, menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai multikultural karena Islam adalah agama yang dengan tegas mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup bersama dan saling menghormati satu dengan yang lainnya.

Manusia diciptakan dengan bermacam-macam perbedaan supaya bisa saling berinteraksi mengenal antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan bangsa dan suku tentu akan melahirkan bermacam budaya yang ada di masyarakat yang menjadi kekayaan bangsa, namun jika perbedaan tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi masalah yang akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Di satu sisi multikultural masyarakat dapat menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik dan profesional, namun jika tidak, perbedaan cara pandang antar individu bangsa yang multikultural ini akan menjadi faktor penyebab disintegrasi bangsa dan konflik yang berkepanjangan.²⁸

Al Qur'an, sebagai kitab petunjuk yang bersifat universal memuat berbagai macam ayat berisikan pedoman-pedoman dan pokok-pokok peraturan yang sangat dibutuhkan manusia untuk mengatur kehidupannya, baik yang berhubungan dengan keimanan, maupun peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia baik secara personal maupun komunal.

Dari sekian banyak petunjuk yang terdapat di dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berisi pesan-pesan yang seharusnya menjadi pedoman bagi umat manusia terhadap upaya menjaga kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan yang multikultural.

²⁸ Gunawan, K., & Rante, Y. (2011). Manajemen Konflik Atasi Dampak Masyarakat Multikultural di Indonesia. *Jurnal Mitra Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 212-224.

Di antara pesan yang disampaikan al-Qur'an atas kerukunan adalah Allah Swt., berfirman dalam Surat al-Hujurat [49]: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Teliti.”*

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari asal yang sama sebagai keturunan Adam dan Hawa yang tercipta dari tanah. Seluruh manusia sama di hadapan Allah, manusia menjadi mulia bukan karena suku, warna kulit ataupun jenis kelamin melainkan karena ketakwaannya. Kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan penciptaan semacam itu bukan untuk saling menjatuhkan, menghujat, dan bersombong ria melainkan agar masing-masing saling kenal-mengenal untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan semangat saling tolong-menolong.²⁹

Dari paparan ayat ini dapat dipahami bahwa agama Islam secara normatif telah menguraikan tentang kesetaraan dalam bermasyarakat yang tidak mendiskriminasikan kelompok lain. Islam menghargai kesamaan antar manusia.

Di sisi lain, Allah Swt., dalam al-Qur'an menyatakan bahwa dulu manusia adalah umat yang satu. Ketika muncul perselisihan, maka Allah Swt., mengutus para Nabi. Para Nabi inilah yang berkedudukan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang berisi petunjuk, untuk memberikan keputusan yang benar dan lurus di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Hal ini tergambar dengan jelas dari firman Allah Swt., dalam Surat al-Baqarah [2]: 213 yang berbunyi:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ

²⁹ Abi al-Qāsim Muḥammad Ibn ‘Umar al-Zamakhshari, *Al-Kassayāf*, Beirut: Maktabah al-‘Ilmiyah, 1998, Jilid, 5, hal. 575.

بَعِيَا ۖ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَىٰ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: “Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.” (al-Baqarah [2]: 213).

Selain dua ayat di atas, Allah Swt., juga mengidentifikasi mengenai pentingnya untuk saling percaya, pengertian, dan menghargai orang lain, menjauhi buruk sangka dan mencari kesalahan orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Hujurat ayat [49]: 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنَاهُ ۗ وَأَنفُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.”

Tafsiran surat al-Hujurat [49]:12 di atas menurut al-Marāgi, Allah mendidik para hamba-Nya yang mukmin dengan pendidikan yang menjamin terciptanya rasa kasih sayang dan persaudaraan di antara mereka. Ada 3 ketentuan yang bisa memperkuat ikatan antar masyarakat muslim, yaitu; menjauhi prasangka buruk kepada orang lain, menghindari pembicaraan yang mengarah pada kekurangan dan keburukan orang lain dan terakhir tidak boleh saling mengekspresikan rasa tidak senang kepada orang lain ketika yang

dibicarakan tidak sedang bersamanya.³⁰ Dalam kehidupan pun, seringkali terdapat perbedaan, hingga terjadi perselisihan. Namun demikian, al-Qur'an mengajarkan tentang bagaimana menyelesaikannya. Al-Qur'an hadir dengan mengedepankan klarifikasi, dialog, diskusi, dan musyawarah. *Tabayun*, menjadi aspek penting yang ditawarkan Islam dalam menghadapi segala persoalan. Setiap individu, siapa pun dia, atau menduduki jabatan apapun, tidak boleh menjatuhkan vonis atau stigma tanpa mengetahui dengan jelas permasalahannya. Hal ini terlihat dengan jelas dari firman Allah Swt., pada surat al-Hujurat [49]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لَدْغِيمٍ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Selain ayat di atas, al-Qur'an mengajarkan untuk tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Islam menghormati keyakinan yang dijalankan seseorang. Islam hadir memberikan ruang kepada siapa pun untuk memahami, meyakini, dan menjalankan keyakinan atas suatu agama apapun. Hal ini terlihat dengan baik ketika Allah Swt., berfirman dalam surat al-Baqarah [2]: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

³⁰ Ahmad Musthafa al-Maragi, *Tafsir al-Marāḡī*, Kairo: Makatabah al-Bāb al-Halbi, 1365H, juz: 26, h. 137.

Paksaan (*ikrah*) dalam berkeyakinan tidak akan menumbuhkan sikap kepatuhan pada Tuhan, kecuali sikap permusuhan, konflik dan dendam antar pemeluk agama. *Mufassir* kontemporer al-Marāgi menafsirkan “tidak ada paksaan keyakinan”, bahwa, tidak boleh terjadi pemaksaan dalam persoalan keyakinan (*ad-dīn*). Karena ini bertolak belakang dengan makna iman itu sendiri, yaitu ketundukan (*iz’ān*) dan kepatuhan (*khudhū’*) yang hanya bisa didapat dengan bukti dan argumentasi yang bisa diterima nalar, bukan dengan cara paksa dan intimidasi (*ilzām wa ikrah*).³¹ Jika pun terjadi konflik atau perselisihan di antara masyarakat, Islam hadir dengan menekankan agar menghindari konflik dan melaksanakan perdamaian atas berbagai persoalan yang terjadi, yakni upaya perdamaian melalui sarana pengampunan atau memaafkan.

Pemberian ampun atau maaf dalam rekonsiliasi adalah tindakan tepat dalam situasi konflik komunal. Dalam ajaran Islam, seluruh umat manusia harus mengedepankan perdamaian, cinta damai dan memberi rasa aman bagi seluruh makhluk. Juga secara tegas al-Qur’an menganjurkan untuk memberi maaf, membimbing ke arah kesepakatan damai dengan cara musyawarah, duduk satu meja dengan prinsip kasih sayang. Hal tersebut digambarkan dengan jelas ketika Allah Swt. berfirman dalam Surat asy-Syūra [42]: 40

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا قَمَنَ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik(2) Maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim”. (asy-Syūra [42]: 40).

Konsep dan ajaran-ajaran yang digambarkan dari ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa sumber perselisihan, permusuhan dan perpecahan di kalangan masyarakat, adalah bukan karena ajaran agama yang dianutnya melainkan karena rasa dengki yang membuat mereka mengabaikan ajaran agamanya masing-masing.

Setiap agama mengajarkan kebaikan. Setiap keyakinan, mengajarkan kebaikan sikap terhadap orang lain. Setiap kepercayaan, menghadirkan kepercayaan atas keyakinan setiap orang dalam menjalankan keyakinannya.

³¹ Ahmad Musthafa al-Maragi, *Tafsīr al-Marāgi...*, juz: 3, h. 17.

Oleh karenanya, yang harus hadir adalah bagaimana menghilangkan rasa benar sendiri dalam menjalankan nilai ajarannya, dan bagaimana seseorang menghilangkan rasa dengki atas orang lain, dan murni mengamalkan ajaran agamanya. Jika hal ini dapat terwujud, niscaya tidak terjadi perselisihan semacam apapun di kalangan masyarakat. Karena, tiap-tiap agama mengajarkan pemeluknya untuk menjadi manusia-manusia yang baik dan menghargai orang lain.

Selain ayat-ayat di atas, Rasulullah Saw., mengajarkan umatnya bagaimana bersikap terhadap orang lain. Di antara Sabda Rasulullah Saw., adalah bagaimana sikap seorang muslim yang tidak boleh berburuk sangka terhadap orang lain. Sabda Rasulullah saw., yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ،
وكونوا عباد الله إخوانا

Artinya: *“Diriwayatkan dari Abi Hurairah RA dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Takutlah kalian terhadap persangkaan buruk, sesungguhnya prasangka buruk adalah seburuk-buruknya pemberitaan dan janganlah kalian mencari aib orang lain, mendengki, membenci dan saling bermusuhan. Dan jadilah hamba Allah yang saling bersaudara.”*³²

Sikap yang diajarkan Rasulullah saw., atas hadis di atas adalah cerminan bahwa Islam menghadirkan kebaikan dalam semua hal, baik yang berhubungan dengan ibadah pribadi kepada Allah, ataupun dengan hubungan sosial kemasyarakatan.

Hal yang sejalan dengan sikap persamaan adalah, ketika Rasulullah Saw., mengidentifikasi bahwa tidak ada keutamaan dari orang Arab dengan bukan orang Arab. Semua suku bangsa baik Asia, Eropa, Amerika, berkulit putih atau berkulit hitam semuanya sama di hadapan Allah swt. Hal ini menandakan akan kesamaan derajat manusia, tanpa ada perbedaan derajat di antara manusia. Sabda Rasulullah Saw., yang menandakan sikap ini adalah hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal:

³² Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Bab Musnad Ahmad*, jilid. 17, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1994, h. 108.

قال رسول الله يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد و إن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجمي و لا لأعجمي على عربي و لا لأحمر على أسود و لا أسود على أحمر إلا بالتقوى.

Artinya : *“Wahai manusia sekalian, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, bapak kalian juga satu, ketahuilah tidak ada keutamaan dari orang arab terhadap non arab, dan juga tidak ada keutamaan orang non arab dari orang arab kecuali ketakwaannya. (HR. Imam Ahmad).”*³³

Pun demikian, ketika menjalankan ajaran agama, Rasulullah Saw., menempatkan arahan agar bersifat toleran dengan siapa pun, termasuk terhadap yang berbeda keyakinan.

Arahan Rasulullah Saw., melalui hadis beliau menunjukkan bahwa sikap yang terbaik dalam menjalankan keyakinan agama adalah dengan sikap yang benar (lurus) dan memiliki sikap toleran terhadap perbedaan yang ada. Sabda beliau dapat terbaca pada redaksi di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي زَيْدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi telah menceritakan kepada saya Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah saw. "Agama manakah yang paling dicintai oleh Allah?" maka beliau bersabda: "Al-Hanifiyyah As-Samhah (yang lurus lagi toleran)”*.³⁴

Konsep ajaran Islam pun diajarkan Rasulullah melalui sabdanya untuk menempatkan manusia atau orang lain pada posisi yang setara. Di antara sikap ajaran Rasulullah Saw., adalah tidak khianat ataupun semena-mena terhadap orang lain. Baik dalam satu keyakinan, ataupun dengan keyakinan yang berbeda. Seperti dalam sabda Rasulullah Saw. yang artinya: “Dari Ibnu Mas’ud ra., sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Tiga golongan yang menjadi musuh Allah pada hari kiamat, barang siapa yang menjadi musuh-

³³ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Bab Rajul min Ashāb al-Nabi*, jilid. 51, h. 244.

³⁴ Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Bab Musnad Abdullah ibn Abbas*, jilid. 5, h. 167.

Ku, maka Aku akan memusuhiku. Pertama, seseorang yang berjanji setia pada-Ku, namun mengkhianatinya. Kedua, seseorang yang menjual orang lalu memakan hasil penjualannya. Ketiga, seseorang yang mempekerjakan seseorang buruh, namun setelah pekerja itu selesai menyelesaikan pekerjaannya, orang tersebut tidak menerima upahnya. (HR. Ibnu Majah).³⁵

Dalam hubungan komunikasi antar umat agama, Nabi tidak melarang untuk mengikat hubungan kemanusiaan. Agama, sejatinya tidak menjadi penghalang untuk terjalinnya komunikasi antara umat manusia, termasuk bagi yang berbeda keyakinan. Hal ini terlihat dengan jelas apa yang disabdakan Rasulullah Saw., pada hadis di bawah ini:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِذَا سَلَّمْتَ عَلَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

Artinya: “Apabila salah seorang ahli kitab mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah dengan ‘Wa’alaika’.”³⁶

Hadis Nabi Muhammad saw. mengajarkan untuk bersikap adil dengan memberikan hak secara proporsional.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْرَامِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيِّ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ « يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِيكُمْ يَا عِبَادِي

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abdullah ibn Abdurrahman ibn Bahram al-Darimi, menceritakan kepada kami Marwan ibn Muhammad al-Dimasyqi, menceritakan kepada kami Sa’id ibn Abdul Aziz dari Rabi’ah ibn Yazid dari Abi Idris al-Khaulani dari Abi Dzar dari Nabi Saw, sebagaimana yang diterima beliau dari Allah SWT, Dia berfirman “Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedhaliman terhadap diriku sendiri, dan aku telah menjadikannya haram pula di antara kalian, maka janganlah saling mendhalimi.” (HR. Muslim).³⁷

³⁵Muhammad ibn Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini [Ibnu Majah], *Sunan Ibn Majah, Bab Ajru al-Ujara*, jilid. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), h. 816.

³⁶ Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hanbal, bab Musnad Anas bin Malik, jilid. 26, h. 295.

³⁷ Muslim ibn Hajjaj, *Sahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyiddin al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 996), juz:4, h. 342.

Selain ayat dan hadis di atas, Allah juga mengingatkan manusia agar saling bersatu padu dalam Q.S. Ali ‘Imran [3]: 105 yang berbunyi:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ³⁸

Artinya: “*dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.*” Q.S. Ali ‘Imran [3]: 105.

Rasulullah bersabda yang artinya: Artinya: “*Siapa saja yang ingin dijauhkan dari Neraka dan menginginkan masuk Surga, maka hendaknya mati dalam keadaan sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Nabi akhir, serta berbuat sesama manusia yang ia senang orang itu datang kepadanya*” (H.R. Muslim).³⁸

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

...“*Janganlah kalian saling membenci, saling menghasut, saling membelakangi dan saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh bagi seorang muslim membuat (tidak bertegur sapa) dengan saudaranya sesama muslim lebih dari tiga hari*” (HR. Muslim).³⁹

Merujuk ayat dan hadis di atas, digambarkan dengan jelas bahwa Islam tidak mempertentangkan multikulturalisme. Konsep Multikulturalisme menggambarkan kesamaan sikap dengan ajaran Islam dalam mendudukkan persamaan manusia di hadapan manusia lain. Keberagaman yang muncul, bukanlah menjadi suatu permasalahan, akan tetapi menjadi kekayaan yang bisa saling melengkapi dalam membangun peradaban masyarakat.

Satu hal yang harus dipahami bersama dari gagasan multikulturalisme adalah menghargai dan menghormati hak-hak sipil, termasuk hak-hak kelompok minoritas.

³⁸ Muslim ibn Hajjaj, Sahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyiddin al-Nawawi...juz:3, h.187.

³⁹ Muslim ibn Hajjaj, Sahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyiddin al-Nawawi...juz:2, h. 275.

Dalam mewujudkan kerukunan dan kebersamaan dalam pluralitas dan multikultural agama, surah al-Nahl ayat 125 menganjurkan dialog dengan baik. Dalam dialog, seorang muslim hendaknya menghindari mengklaim dirinya sebagai orang yang berada dalam pihak yang benar, tapi dengan menunjukkan bukti sehingga orang lain bisa melihat kenyataan akan kebenaran Islam. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan tentang agama kepada mitra dialog. Dialog tersebut dengan sendirinya akan memperkaya wawasan kedua belah pihak dalam rangka mencari persamaan-persamaan yang dapat dijadikan landasan untuk hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Pendidikan Multikulturalisme Sebagai Upaya Mencegah Konflik

Teori Konflik dan Jenis-jenisnya

Secara etimologi, konflik berasal dari kata kerja bahasa Latin, *configere*, yang artinya saling memukul.⁴⁰ Dilihat dari sisi istilah, konflik berarti percekocokan; perselisihan; pertentangan.⁴¹ Jika dilihat dari pengertian ini, maka terlihat bahwa konflik terjadi antara dua orang atau lebih, yang menginginkan atau berusaha untuk menyingkirkan satu dengan yang lainnya.

Konflik merupakan kenyataan dalam kehidupan. Konflik lahir dari sebuah perbedaan. Perbedaan dalam kehidupan manusia, yang menjadi lumrah adanya. Perbedaan cara pandang, perbedaan kelamin, perbedaan suku, menjadi pemicu awal atas terjadinya konflik di tengah masyarakat. Konflik, bisa terjadi dari struktur kehidupan yang terkecil hingga besar. Mulai pribadi, sampai dengan kelompok ataupun komunitas. Konflik acapkali terjadi karena ketidaksepahaman ataupun kesenjangan.

Dari segi dampak, konflik dapat dipandang dengan dua dimensi. Pertama dimensi positif, konflik dapat mendinamisasikan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Konflik dapat memacu bagi terjadinya kompetisi yang sehat, orang berupaya untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya. Konflik bisa menjadi tahap awal perubahan sosial. Kedua dimensi negatif, konflik

⁴⁰ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama dan Konflik Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, h. 33.

⁴¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 937.

merupakan salah satu masalah yang perlu diatasi. Konflik yang sengit dapat memicu perselisihan dan permusuhan yang tajam, yang mengganggu suasana antarkelompok dalam masyarakat.⁴² Coser membangun teori konflik pada aspek analisis individu. Menurut Coser, bahwa konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi atau berkonflik dengan masyarakat lain, dapat memperbaiki kepaduan integrasi. Selanjutnya Coser menambahkan bahwa konflik dengan satu kelompok dapat membantu menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain. Tidak sekedar itu saja, Coser menambahkan bahwa konflik yang terjadi di dalam masyarakat, dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi dan juga membantu fungsi komunikasi.⁴³

Emile Durkheim, Robert Merton, dan Talcot Parsons seperti dikutip oleh Adon, memandang bahwa konflik sebagai fenomena sosial yang negatif. Mereka percaya bahwa konflik [disintegrasi] merupakan persoalan sosial yang mengganggu keharmonisan, keseimbangan, integrasi, stabilitas, dan pada akhirnya melahirkan disfungsi pada aspek-aspek kehidupan yang lebih luas.⁴⁴

Adapun konflik yang dipandang sebagai hal positif memosisikan konflik sebagai unsur utama dalam kehidupan sosial. Dalam posisi ini, konflik dianggap sebagai hal yang membangun, menyadarkan, bukan sebagai pemusnah.

Dalam pandangan di atas, konflik dijadikan acuan untuk menyadarkan diri, dan bergerak maju untuk memperbaiki. Sehingga konflik diposisikan sebagai pendorong utama bagi perubahan. Pandangan konflik positif seperti hal ini, diwakili oleh Karl Mark dan dikembangkan oleh George Sorel.⁴⁵

Dengan mengacu pada pengertian konseptual tentang konflik sosial tersebut, maka proses konflik sosial akan meliputi spektrum yang lebar. Isu-isu kritis yang membingkai konflik sosial yang sering kali dijumpai dalam sistem sosial (di segala tataran) adalah:

⁴² Suwandi Sumartias dan Agus Rahmat, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konflik Sosial...*, h. 15.

⁴³ Coser Lewis A., 1956. *The Function of Social Conflict*. New York. The Free press, h. 41.

⁴⁴ Dikutip oleh Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama dan Konflik Sosial...*, h. 35.

⁴⁵ Dikutip oleh Adon Nasrullah Jamaluddin, *Agama dan Konflik Sosial...*, h. 36.

1. Konflik antar kelas sosial (*social class conflict*) sebagaimana terjadi antara “kelas buruh” melawan “kelas majikan” dalam konflik hubungan-produksi, atau “kelas tuan tanah” melawan “kelas buruh-tani” dalam konflik agraria.
2. Konflik modal produksi dalam perekonomian (*modes of production conflict*) yang berlangsung antara kelompok pelaku ekonomi bermodalan (cara-produksi) ekonomi peasantry-tradisionalisme (pertanian skala kecil subsisten-sederhana) melawan para pelaku ekonomi bersendikan modal-ekonomi akumulasi profit dan eksploitatif.
3. Konflik sumber daya alam dan lingkungan (*natural resources conflict*) adalah konflik sosial yang berpusat pada isu “*claim dan reclaiming*” penguasaan sumber daya alam (tanah atau air) sebagai pokok sengketa terpenting. Dalam banyak hal, konflik sumber daya alam berimpitan dengan konflik agraria, di mana sekelompok orang memperjuangkan hak-hak penguasaan tanah yang diklaim sebagai properti mereka melawan negara, badan swasta atau kelompok sosial lain.
4. Konflik ras (*ethnics and racial conflict*) yang mengusung perbedaan warna kulit dan atribut sub-kultural yang melekat pada warna kulit pihak-pihak yang berselisih.
5. Konflik antar-pemeluk agama (*religious conflict*) yang berlangsung karena masing-masing pihak mempertajam perbedaan prinsip yang melekat pada ajaran masing-masing agama yang dipeluk mereka.
6. Konflik sektarian (*sectarian conflict*), adalah konflik yang dipicu oleh perbedaan pandangan atau ideologi yang dianut antar pihak. Konflik akan makin mempertajam perbedaan pandangan antar mazhab (sering kali pada ideologi yang sama).
7. Konflik politik (*political conflict*) yang berlangsung dalam dinamika oleh kekuasaan (power exercise).
8. Konflik gender (*gender conflict*) adalah konflik yang berlangsung antara dua penganut pandangan berbeda dengan basis perbedaan adalah jenis-kelamin. Para pihak mengusung kepentingan-kepentingan (politik, kekuasaan, ekonomi, peran sosial) yang berbeda dan saling berbenturan antara dua kelompok penyokong yang saling berseberangan.
9. Konflik-konflik antar komunitas (*communal conflicts*), yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: eksistensi identitas budaya

komunitas dan faktor sumber daya kehidupan (*sources of sustenance*). Konflik komunal sering kali bisa berkembang menjadi konflik teritorial jika setiap identitas kelompok melekat juga identitas kawasan.

10. Konflik teritorial (*territorial conflict*) adalah konflik sosial yang dilancarkan oleh komunitas atau masyarakat lokal untuk mempertahankan kawasan tempat mereka membina kehidupan selama ini. Konflik teritorial sering kali dijumpai di kawasan-kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), di mana komunitas adat/lokal merasa terancam sumber kehidupan dan identitas sosio-budayanya manakala penguasa HPH menghabisi pepohonan dan hutan di mana mereka selama ini bernaung dan membina kehidupan sosial-budaya dan sosio-kemasyarakatan.
11. *Inter-state conflict* adalah konflik yang berlangsung antara dua negara dengan kepentingan, ideologi dan sistem ekonomi yang berbeda dan berbenturan kepentingan dengan pihak lain negara.
12. Dalam kecenderungan global, *inter-state conflict* bisa berkembang menjadi regional *conflict* sebagaimana terjadi pada era “perang dingin” (Blok Uni Soviet vs Blok USA), atau peperangan di Balkan pada akhir dekade 1990an, di mana USA dan NATO menghabisi Serbia.⁴⁶

Dalam perkembangannya, konflik terbagi kepada dua bentuk. Hal ini diungkapkan oleh Coser dalam bukunya *The Function of Social Conflict*.

Pertama, konflik dalam bentuk realistik dan non-realistik. Konflik realistik adalah konflik yang terjadi akibat kekecewaan individu atau kelompok atas tuntutan atau perkiraan keuntungan yang terjadi dalam hubungan sosial. Sedangkan konflik non-realistik, terjadi bukan akibat tuntutan individu yang mencari keuntungan, atau persaingan, melainkan kebutuhan untuk meredakan ketegangan.⁴⁷ Pendapat yang sama dikemukakan oleh Johnson, D.P dalam bukunya, *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*, yang dikutip oleh Suwandi Sumartias, menyatakan konflik dapat

⁴⁶ Arya Hadi Dharmawan, *Konflik-Sosial dan Resolusi Konflik: Analisis Sosio-Budaya (Dengan Fokus Perhatian Kalimantan Barat)*, Makalah disusun dan disajikan pada Seminar dan Lokakarya Nasional Pengembangan Perkebunan Wilayah Perbatasan Kalimantan, dengan tema: “Pembangunan Sabuk Perkebunan Wilayah Perbatasan Guna Pengembangan Ekonomi Wilayah dan Pertahanan Nasional”, Pontianak 10-11 Januari 2007, h. 7-8. -

⁴⁷ Coser Lewis A., 1956. *The Function of Social Conflict*, h. 57.

dibedakan antara konflik realistik dan konflik non-realistik. Konflik realistik merupakan suatu alat untuk suatu tujuan tertentu, yang kalau tujuan itu tercapai mungkin akan menghilangkan sebab-sebab dasar dari konflik itu. Sebaliknya, konflik non-realistik adalah ungkapan permusuhan sebagai tujuannya sendiri. Konflik realistik adalah kompetisi untuk memperoleh sumber daya langka dan terbatas.⁴⁸

Kedua, konflik yang terlihat dari sisi tempat, yaitu konflik *in-group* dan *out-group*. Konflik *in-group* adalah konflik yang terjadi di dalam struktur organisasi atau masyarakat itu sendiri. Sedangkan konflik *out-group* adalah konflik yang melibatkan organisasi atau kelompok masyarakat lainnya.⁴⁹

Usaha dan Pencegahan Konflik Melalui Pendidikan Multikulturalisme

Keprihatinan terhadap maraknya kekerasan, konflik, dan perpecahan menjadi alasan utama terhadap munculnya gagasan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dipandang mampu dijadikan sebagai solusi dari persoalan tersebut. Hal inilah kemudian ditindak lanjuti melalui berbagai usaha para pemikir untuk merumuskan secara tuntas konsep pendidikan multikultural seperti apa yang bisa menjadi terapi terhadap keprihatinan tadi. Mulai dari membangun argumentasi dasar-dasar pendidikan multikultural, persiapan, pelaksanaan sampai pada bagaimana merumuskan indikator-indikator ketercapaian tujuannya.

Sampai pada titik ini, asumsi awal yang terbangun adalah bahwa solusi terbaik untuk mencegah konflik adalah dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural masih dapat dijadikan salah satu alternatif dalam menangani problem-problem sosial seperti kekerasan, konflik dan perpecahan.⁵⁰ Dalam kasus yang lebih spesifik, Konflik yang melibatkan berbagai macam kelompok masyarakat dengan mengatasnamakan agama, ras, suku dan antar golongan merupakan tindakan yang dapat memicu timbulnya disintegrasi bangsa. Dalam konteks Indonesia yang sangat kaya akan perbedaan, disintegrasi yang berujung pada tindakan separatis menjadi

⁴⁸ Suwandi Sumartias dan Agus Rahmat, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konflik Sosial*, Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 16 No. 1, Juli 2013, h. 16.

⁴⁹ Adon Nasullah Jamaluddin, *Agama dan Konflik Sosial...*, h. 39.

⁵⁰ Belger dan Luckman, *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta: LP3ES, 1990, h. 103.

hal yang sangat berbahaya dan mengancam keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Belakangan, agama menjadi isu hangat dan cenderung dijadikan sebagai landasan utama untuk mempertajam konflik. Isu penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama kontra Aksi Bela Islam sejak tahun 2016 mendapat perhatian serius di mata masyarakat dan mendapat tempat khusus di media-media nasional. Dampaknya adalah masyarakat terinternalisasi secara otomatis sikap *outgroup* dan *ingroup* di dalam diri mereka.⁵¹ Bahwa saya berbeda agama, karenanya anda bukan bagian dari diri saya. Sikap tersebut sekilas sah dan tidak terdapat persoalan yang mengkhawatirkan. Namun, sesungguhnya terdapat suatu problematik mendasar dalam nalar masyarakat mengenai pemahaman berbangsa dan bernegara dengan melibatkan tema agama.

Dalam hal ini yang dibahas bukanlah detail persoalan penistaan agama, namun bagaimana kesadaran keagamaan itu justru mengikis sedikit demi sedikit kesadaran berbangsa Indonesia. Inilah yang dimaksud sebagai problematik mendasar. Korban utamanya adalah masyarakat awam yang secara tidak sadar membatinkan sikap anti terhadap agama lain. Haryatmoko menyebut kunci masalahnya terletak pada 'tidak bisa menerima yang berbeda'. Ia menyebut bahwa konflik antar agama, terutama antara Islam dan Kristen di Indonesia pada dasarnya tidak lepas dari kebencian dan itu memang sungguh ada dan dirasakan.⁵² Tentu problem ini memiliki signifikansi yang memadai, apalagi jika melihat kenyataan maraknya ujaran kebencian yang dimunculkan masyarakat melalui media sosial.

Merevitalisasi nalar kebangsaan agaknya menjadi penting untuk dilakukan agar 'menerima yang berbeda' menjadi mungkin untuk diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revitalisasi nalar kebangsaan ini dapat diwujudkan melalui suatu konsep pendidikan yang mengakomodasi berbagai macam perbedaan dan mengakar pada sejarah bangsa Indonesia dalam bentuk epistemologi pendidikan multikultural yang mapan dan khas Indonesia. Artinya usaha tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan. Hal ini mengandaikan bahwa pendidikan multikultural digunakan untuk antisipasi

⁵¹ Istilah in-group dan out-group bisa dilihat dalam kajian Coser Lewis A., 1956. *The Function of Social Conflict*, , h. 41.

⁵² Haryatmoko, *Dominasi Penuh Muslihat; Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, Jakarta: Gramedia, 2010, h. 83.

terhadap munculnya kekerasan, konflik dan perpecahan. Sifat antisipatif ini diberikan karena ‘obyek’ yang dikenai belum tentu mengalami ketiga problem tersebut.

Sedangkan problem selanjutnya adalah usaha konseptualisasi pendidikan multikultural ternyata belum sampai pada taraf yang kuat. Sangkot Sirait menyetujui hal tersebut dengan menjelaskan bahwa secara konseptual rumusan pendidikan multikultural belum menunjukkan jati dirinya.⁵³ Ngainun Naim pun mengakui bahwa istilah multikultural dikaitkan dengan pendidikan masih sedikit yang membahasnya.⁵⁴

Kesadaran multikultur sebenarnya sudah muncul sejak Negara Republik Indonesia terbentuk. Pada masa Orde Baru, kesadaran tersebut dipendam atas nama kesatuan dan persatuan. Paham monokulturalisme kemudian ditekankan. Akibatnya sampai saat ini, wawasan multikulturalisme bangsa Indonesia masih sangat rendah. Ada juga pemahaman yang memandang multikultur sebagai eksklusivitas. Multikultur justru disalahartikan yang mempertegas batas identitas antar individu. Bahkan ada yang juga mempersoalkan masalah asli atau tidak asli.

Multikultur baru muncul pada tahun 1970-an yang awalnya mengkritik penerapan persoalan rasisme dan tindakan-tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di beberapa negara Eropa seperti Kanada, Inggris, Jerman, Amerika dan Australia. Sejak tahun 1980 hingga 1990 pendidikan multikultural menjadi selogan yang sangat populer dan diterima sebagai strategi penting dalam mengembangkan toleransi dan sensitivitas terhadap sejarah dan budaya dari kelompok etnis yang beraneka macam di negara ini.

Cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia Baru harus dilakukan dengan cara membangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde Baru. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis, adanya dan ditegakkannya hukum untuk supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN, terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga masyarakat, dan kehidupan ekonomi yang menyejahterakan rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dari hasil

⁵³ Sangkot Sirait, *Landasan Normatif Pendidikan Islam Multikultural*, dalam Antologi Pendidikan Agama Islam, Yogyakarta: Idea Press, 2010, h. 169.

⁵⁴ Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural*, h. 49.

reformasi atau perombakan tatanan kehidupan Orde Baru adalah sebuah “masyarakat multikultural Indonesia” dari puing-puing tatanan kehidupan Orde Baru yang bercorak “masyarakat” (*plural society*) sehingga corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika bukan lagi keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya tetapi keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.⁵⁵

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesetaraan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mozaik tersebut. Pendidikan multikultural distilahkan James Banks sebagai pendidikan untuk *people of color*.⁵⁶ Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”.

Hal yang harus diwaspadai adalah munculnya perpecahan etnis, budaya dan suku di dalam tubuh bangsa kita sendiri. Bangsa Indonesia yang kita tahu bersama memiliki bermacam-macam kebudayaan yang dibawa oleh banyak suku, adat-istiadat yang tersebar di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke kita telah banyak mengenal suku-suku yang majemuk, seperti; Suku Jawa, Suku Madura, Suku Batak, Suku Dayak, Suku Asmat dan lainnya. Yang semuanya itu mempunyai keunggulan dan tradisi yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Begitu kayanya bangsa Indonesia dengan suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan khazanah yang lain ini, apakah benar-benar menjadi sebuah

⁵⁵ Deskripsi ini dapat dilihat pada tulisan Hadi Nurcahyono, Pendidikan Multikultural Di Indonesia: Analisis Sinkronis Dan Diakronis, *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi* Vol. 2 No.1 Maret 2018 p.106-107.

⁵⁶ James Banks, “*Multicultural Education: Historical Development, Dimensions, And Practice*”, *Review of Research in Education*, 1993, hlm. 3.

kekuatan bangsa ataukah justru berbalik menjadi faktor pemicu timbulnya disintegrasi bangsa. Seperti apa yang telah diramalkan Huntington, keanekaragaman di Indonesia ini harus kita waspadai. Karena telah banyak kejadian-kejadian yang menyulut kepada perpecahan, yang disebabkan adanya paham sempit tentang keunggulan sebuah suku tertentu.

Paham Sukuisme sempit inilah yang akan membawa kepada perpecahan. Seperti konflik di Timur-Timur, di Aceh, di Ambon, dan yang lainnya. Entah konflik itu muncul semata-mata karena perselisihan di antara masyarakat sendiri atau ada “sang dalang” dan provokator yang sengaja menjadi penyulut konflik. Mereka yang tidak menginginkan sebuah Indonesia yang utuh dan kokoh dengan keanekaragamannya. Untuk itu kita harus berusaha keras agar kebhinnekaan yang kita banggakan ini tak sampai meretas simpul-simpul persatuan yang telah diikat dengan paham kebangsaan oleh Bung Karno dan para pejuang.

Hal ini disadari betul oleh para *founding father* Indonesia, sehingga mereka merumuskan konsep multikulturalisme ini dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Sebuah konsep yang mengandung makna yang luar biasa. Baik makna secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, semboyan ini mampu mengangkat dan menunjukkan akan keanekaragaman bangsa kita. Bangsa yang multikultural dan beragama, akan tetapi bersatu dalam kesatuan yang kokoh. Selain itu, secara implisit “Bhineka Tunggal Ika” juga mampu memberikan semacam dorongan moral dan spiritual kepada bangsa Indonesia, khususnya pada masa-masa pasca kemerdekaan untuk senantiasa bersatu melawan ketidakadilan para penjajah. Walaupun berasal dari suku, agama dan bahasa yang berbeda.

Kemudian munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan perbedaan ini yang sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah Belanda. Yang kemudian dikenal sebagai cikal bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. Multikulturalisme ini juga tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, sebagaimana dapat dilihat, antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI. Betapa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme, perbedaan (multikulturalisme). Baik dalam konteks sosial maupun politik. Bahkan pencoretan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta, pun dapat dipahami dalam konteks menghargai sebuah multikulturalisme dalam arti luas.

Kemudian sebuah ideologi yang diharapkan mampu menjadi jalan tengah sekaligus jembatan yang menjembatani terjadinya perbedaan dalam negara Indonesia. Yaitu Pancasila, yang seharusnya mampu mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multi-etnis, dan agama ini. Termasuk dalam hal ini Pancasila haruslah terbuka. Harus memberikan ruang terhadap berkembangnya ideologi sosial politik yang pluralistik.

Pancasila adalah ideologi terbuka dan tidak boleh mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik, etnis dan budaya. Melalui Pancasila seharusnya bisa ditemukan sesuatu sintesis harmonis antara pluralitas agama, multikultural, kemajemukan etnis budaya, serta ideologi sosial politik, agar terhindar dari segala bentuk konflik yang hanya akan menjatuhkan martabat kemanusiaan itu.⁵⁷

Walaupun multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesetaraan. Ulasan mengenai multikulturalisme mau tidak mau juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Dalam upaya membangun masa depan bangsa, paham multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana, melainkan sebagai sebuah ideologi yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri yang terpisah dari ideologi-ideologi lainnya. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan bagi memahaminya dan mengembangkannya dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵⁷ Dapat dilihat penjelasannya di Zet Sahuburua, *Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi dan Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Bidang Politik, Hukum dan Ketatanegaraan*, Tim Pusat Studi Pancasila UGM dan Yim Universitas Pattimura Ambon, Prosiding Kongres Pancasila VI, Yogyakarta, Pusat Studi Pancasila Unibersitas Gadjah Mada, h.50.

Untuk dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep-konsep yang relevan dengan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia.

Sebagai sebuah ide atau ideologi multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, dan kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan kajian-kajian mengenai corak kegiatan, yaitu hubungan antar manusia dalam berbagai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya akan merupakan sumbangan yang penting dalam upaya mengembangkan dan memantapkan multikulturalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia.

Salah satu isu yang cukup penting untuk diperhatikan di dalam kajian-kajian mengenai manajemen pengelolaan sumber-sumber daya adalah corak dari kebudayaan manajemen yang ada setempat, atau pada corak kebudayaan korporasi bila perhatian kajian terletak pada kegiatan pengelolaan manajemen sumber daya dalam sebuah korporasi. Perhatian pada pengelolaan manajemen ini akan dapat menyingkap dan mengungkapkan seperti apa corak nilai-nilai budaya dan operasionalisasi nilai-nilai budaya tersebut atau etos, dalam pengelolaan manajemen yang dikaji.

Kajian seperti ini juga akan dapat menyingkap dan mengungkap seperti apa corak etika (*ethics*) yang ada dalam struktur-struktur kegiatan sesuatu pengelolaan manajemen yang memproses masukan (*in-put*) menjadi keluaran (*out-put*). Apakah memang ada pedoman etika dalam setiap struktur manajemen, atautakah tidak ada pedoman etikanya, atautakah pedoman etika itu ada yang ideal (yang dicita-citakan dan yang dipamerkan) dan yang aktual (yang betul-betul digunakan dalam proses-proses manajemen dan biasanya disembunyikan dari pengamatan umum)?

Permasalahan etika ini menjadi sangat penting dalam pengelolaan manajemen sumber daya yang dilakukan oleh berbagai organisasi, lembaga, atau pranata yang ada dalam masyarakat. Bangsa Indonesia kaya raya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas. Akan tetapi pada masa sekarang ini, bangsa Indonesia, tergolong sebagai bangsa yang paling miskin di dunia dan tergolong ke dalam bangsa-bangsa yang tingkat korupsinya paling tinggi. Salah satu sebab utamanya adalah karena kita tidak mempunyai pedoman etika dalam mengelola sumber-sumber daya yang kita

punyai. Pedoman etika yang menjamin proses-proses manajemen tersebut akan menjamin mutu yang dihasilkannya.

Cita-cita reformasi yang sekarang ini tampaknya mengalami kemacetan dalam pelaksanaannya, ada baiknya digulirkan kembali. Alat penggulir bagi proses-proses reformasi sebaiknya secara model dapat dioperasionalkan dan dimonitor, yaitu mengaktifkan model multikulturalisme untuk meninggalkan masyarakat majemuk dan secara bertahap memasuki masyarakat multikultural Indonesia. Sebagai model, maka masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan pada ideologi multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika yang multikultural, yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat lokal dan nasional.

Bila pengguliran proses-proses reformasi yang terpusat pada terbentuknya masyarakat multikultural Indonesia itu berhasil, maka tahap selanjutnya adalah mengisi struktur-struktur atau pranata-pranata dan organisasi-organisasi sosial yang tercakup dalam masyarakat Indonesia. Isi dari struktur-struktur atau pranata-pranata sosial tersebut mencakup reformasi dan pembenahan dalam kebudayaan-kebudayaan yang ada, dalam nilai-nilai budaya dan etos, etika, serta pembenahan dalam hukum dan penegakan hukum bagi keadilan.

Dalam upaya ini harus dipikirkan adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada setempat atau pada tingkat lokal maupun pada tingkat nasional dan berbagai corak dinamikanya. Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban dari pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen pemerintahan. Pedoman etika ini akan membantu upaya-upaya pemberantasan KKN secara hukum.

Bersamaan dengan upaya-upaya tersebut di atas, sebaiknya sistem pendidikan nasional juga mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SLTA. Multikulturalisme sebaiknya termasuk dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah menumbuhkan integrasi nasional melalui revitalisasi gagasan (mutualisme, musyawarah dan mufakat, kesetaraan) dan nilai-nilai agama (kasih sayang, damai, keadilan dan persatuan) dalam ruang lingkup pergaulan sesama anak bangsa. Memang tidak mudah bagi bangsa yang pluralistik dan multikultural untuk menjaga integrasi nasional, namun hal tersebut tetap dapat dilakukan.

Hal-hal yang harus dilakukan adalah: *pertama*, meningkatkan pemahaman tentang multikulturalisme Indonesia. Perlu dilakukan penumbuhan rasa saling memiliki aset-aset nasional yang berasal dari nilai-nilai adiluhung bangsa Indonesia, khususnya dari suku-suku bangsa, sehingga mendorong terbentuknya *shared property* dan *shared entitlement*. Artinya upaya membuat seseorang dari kawasan Barat Indonesia dapat menghargai, menikmati dan merasakan sebagai milik sendiri berbagai unsur kebudayaan yang terdapat di kawasan Timur Indonesia, dan demikian pula sebaliknya.

Kedua, setiap program pembangunan hendaknya mengemban misi menciptakan dan menyeimbangkan mutualisme sebagai wujud doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan (*mutualism and brotherhood*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian strategi dan kebijakan pembangunan, khususnya strategi dan kebijakan budaya, harus bertolak dan berorientasi pada upaya memperkokoh persatuan Indonesia melalui upaya menumbuhkan mutualisme antar komponen bangsa dan di tingkat *grass-roots*.

Dalam asas kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan (mutualisme and *brotherhood* atau *ukhuwwah*) yang sekaligus dapat menumbuhkan modal sosial, kerja sama di bidang pembangunan ekonomi dapat melibatkan berbagai lokalitas di tingkat kabupaten/kota, kecamatan ataupun desa, dengan dirancangnya upaya membentuk dan mengembangkannya mutualisme untuk memperkokoh integrasi dan kohesi nasional. Dengan demikian akan terwujud pembangunan ekonomi dan sekaligus interdependensi sosial. Pola interdependensi, yang sekaligus merupakan ketahanan budaya, harus dirancang oleh lembaga perencanaan di tingkat nasional dan tingkat daerah sebagai bagian dari integritas bangsa. Untuk memperkokoh kohesi nasional,

perencanaan akan menjadi tujuan strategis karena perencanaan mendesain masa depan.⁵⁸

Sebagai bangsa yang pluralistik, dalam membangun masa depan bangsa dipandang perlu untuk memberi tempat bagi berkembangnya kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan agama yang ada di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan agama, bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, mewarnai perilaku dan kegiatan masyarakat. Berbagai kebudayaan itu jalan beriringan, saling melengkapi dan saling mengisi, tidak berdiri sendiri-sendiri, bahkan mampu untuk saling menyesuaikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks itu pula maka ribuan suku bangsa sebagai masyarakat yang multikultural yang terdapat di Indonesia serta potensi-potensi budaya yang dimilikinya harus dilihat sebagai aset negara yang dapat didayagunakan bagi pembangunan bangsa ke depan. Intinya adalah menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural yang masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya.

Hal ini juga berarti bahwa masyarakat multikultural harus memperoleh kesempatan yang baik untuk menjaga dan mengembangkan kearifan budaya lokal mereka ke arah kualitas dan pendayagunaan yang lebih baik. Unsur-unsur budaya lokal yang bermanfaat bagi diri sendiri bahkan perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi bagian dari kebudayaan bangsa, memperkaya unsur-unsur kebudayaan nasional. Meskipun demikian, misi utamanya adalah mentransformasikan kenyataan multikultural sebagai aset dan sumber kekuatan bangsa serta menjadikannya suatu sinergi nasional.

Oleh karena itu, walaupun masyarakat multikultural harus dihargai potensi dan haknya untuk mengembangkan diri sebagai pendukung kebudayaannya di atas tanah kelahiran leluhurnya, namun pada saat yang sama, mereka juga harus tetap diberi ruang dan kesempatan untuk mampu melihat dirinya, serta dilihat oleh masyarakat lainnya yang sama-sama merupakan warga negara Indonesia.

⁵⁸Sri Edi Swasono, Kebangsaan, *Kerakyatan dan Kebudayaan*, Tim Pusat Studi Pancasila UGM dan Yim Universitas Pattimura Ambon, Prosiding Kongres Pancasila VI, , h. 80.

Sebagai suatu tawaran konseptual, pendidikan kebhinekaan diposisikan sebagai desain baru pendidikan multikultural di mana tujuan utamanya adalah semakin menguatnya sikap toleransi masyarakat. Untuk itu perlu dilacak terlebih dahulu definisi kebhinekaan itu sendiri. Dan inilah titik tolak utama yang akan dilakukan sebagai upaya konseptualisasinya.

Bhineka Tunggal Ika dilihat dari sejarah nusantara digunakan pertama kali oleh kerajaan Majapahit di mana terdapat dalam Kakawih Sutasoma, karangan Mpu Tantular. Dan pengertiannya pada waktu itu lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga kepercayaan agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit.⁵⁹ Arti istilah bhineka tunggal ika adalah berbeda-beda, namun tetap satu jua. Kemudian kata ini dijadikan semboyan oleh para pendiri bangsa sebagai alat pemersatu. Sehingga pemaknaannya lebih meluas bukan hanya pada kepercayaan, namun berbagai budaya, adat, suku dan ragam lainnya yang ada di Indonesia terangkum dalam satu kata “bhineka tunggal ika”.

Atas dasar sejarah tersebut, barangkali nama pendidikan kebhinekaan sangat sesuai dengan makna dan karakteristik ke Indonesia-annya. Selanjutnya seseorang tidak perlu sungkan untuk menyuarakannya. Dan dasarnya pun akan menjadi kuat karena persoalan yang muncul kemudian adalah bukan masalah istilah yang datang dari barat, akan tetapi persoalan kesadaran berkebhinekaan dalam berbangsa dan bernegara yang kian mengikis sehingga diperlukan sebuah solusi.

Apa yang dimaksud dengan pendidikan kebhinekaan ini juga merupakan bagian dari penguatan identitas nasional. Identitas nasional ini disebut oleh Yudi Latif sebagai perangkat lunak terwujudnya persatuan Indonesia. Identitas nasional ini hanya mungkin disadari ketika eksistensi kebudayaan nasional kita terjaga. Sedangkan kebudayaan nasional sendiri telah merefleksikan persatuan dan kesatuan dalam keragaman, suatu usaha untuk mempertahankan tradisi luhur seraya mengupayakan inovasi dengan mengadopsi unsur-unsur baru; sedapat mungkin, kita mencari titik-titik persamaan (kosmopolitanisme) dengan tetap menghargai perbedaan.⁶⁰ Barangkali apa yang dijelaskan Yudi Latif tersebut semakin memperkuat

⁵⁹ *Dianrana-katulistiwa.com* diakses tanggal 10 Februari 2017.

⁶⁰ Lihat Yudi Latif, *Negara Paripurna*, Jakarta: Gramedia, 2012, h. 353-356.

fondasi dari “pendidikan kebhinekaan” sebagai ganti dari “pendidikan multikultural”.

Tawaran konseptual mengenai pendidikan kebhinekaan ini bukan berasal dari suatu kecurigaan terhadap istilah pendidikan multikultural. Melainkan berangkat dari diri sendiri yang *Indonesianis* sehingga identitas nasional kita menjadi semakin kuat. Selain itu, jika dilihat dari filosofi Pancasila dan historisitas bangsa Indonesia, istilah pendidikan kebhinekaan lebih berbobot daripada istilah pendidikan multikultural. Sampai di sini pijakan pendidikan kebhinekaan menemukan akar yang cukup jelas.

Jika pendidikan kebhinekaan ini dikembangkan sampai pada taraf implementasinya di sekolah, rambu-rambu yang perlu diperhatikan adalah bahwa pendidikan kebhinekaan dapat berfungsi sebagai *hidden curriculum*, pendidikan kebhinekaan berorientasi pada transformasi sikap menghargai perbedaan pada diri siswa, dan pendidikan kebhinekaan bukanlah suatu mata pelajaran seperti halnya mata pelajaran PKn (pendidikan kewarganegaraan).

Selanjutnya, Islam nusantara lahir dengan wajah yang akomodatif, toleran, *rilex* dan *flowering*.⁶¹ Wajah Islam nusantara tersebut dibuktikan dengan dakwah Islam yang tanpa perang dan sekarang hampir seluruh masyarakat Indonesia menganutnya. Artinya, dalam perspektif sejarah, masyarakat Indonesia menerima Islam sebagai agama yang tidak berwajah radikal dan fundamental, melainkan agama yang menawarkan toleransi tinggi terhadap perbedaan-perbedaan. Sangat rasional ketika masyarakat Indonesia pada waktu itu tidak berpikir panjang untuk memeluk agama Islam. Secara detail, Zakiya Darajat mencatat bahwa

*Islam diperkenalkan di Nusantara antara lain dengan menggunakan jalur perdagangan, sebuah media yang sangat melekat dengan tradisi masyarakat Nusantara. Aktivitas perdagangan meniscayakan adanya interaksi sosial yang mutual antara penjual dan pembeli, kesederajatan, dan simbiosis mutualisme antara keduanya, serta jauh dari kesan permusuhan ataupun perasaan superioritas-inferioritas.*⁶²

⁶¹ Zakiya Darajat, *Warisan Islam Nusantara, Jurnal Al-Tuāṣ*, Vol. XXI, No. 1, Januari 2015, h. 79.

⁶²Zakiya Darajat, *Warisan Islam Nusantara...*, h. 76

Universalitas Islam dimaknai tidak seragam oleh umat muslim. Terdapat kelompok yang memaknai bahwa ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad tidak terpisahkan dengan kultur Arab sehingga harus diterima seperti awal kehadirannya. Kelompok lain memahami universalitas ajaran Islam sebagai yang tidak terbatas pada waktu dan tempat, sehingga bisa masuk ke budaya apapun. Kelompok pertama berambisi menyeragamkan seluruh budaya yang ada di dunia menjadi satu, sebagaimana yang dipraktikkan Nabi Muhammad. Budaya yang berbeda dianggap bukan sebagai bagian dari Islam. Kelompok ini disebut kelompok fundamentalis Sementara kelompok kedua menginginkan Islam dihadirkan sebagai nilai yang bisa memengaruhi seluruh budaya yang ada. Islam terletak pada nilai, bukan bentuk fisik dari budaya itu. Kelompok ini disebut kelompok substantif.⁶³

Argumentasi selanjutnya bagaimana Islam nusantara yang sangat akomodatif terhadap budaya asli Indonesia adalah dijadikannya budaya sebagai salah satu sarana penyebaran Islam yang sangat efektif bagi masyarakat Nusantara, khususnya masyarakat Jawa. Para pendakwah Islam antara lain para Wali Songo, menggunakan media seni, baik seni wayang, gamelan, sastra dan sebagainya.⁶⁴ Selain itu, para pendakwah dalam menyebarkan risalah Islam, juga ditopang oleh legitimasi penguasa politik(kerajaan Islam). Dalam tradisi sejarah Nusantara, lahirnya simbiosis mutualisme antara pemuka agama dan penguasa kerajaan telah berlangsung lama sejak kerajaan Hindu dan Budha.⁶⁵

Nurcholish Majdid menyatakan, budaya lokal yang bisa dijadikan sumber hukum adalah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak melanggar ajaran tauhid, seperti takhayul, mitologi, feodalisme, tata sosial tanpa hukum (*laotik*), ketidakpedulian terhadap rakyat kecil, pengingkaran hak asasi, perlawanan terhadap prinsip persamaan umat manusia, dan sebagainya. Karakteristik *jahiliyah* ini harus diganti dengan prinsip-prinsip ajaran tauhid, seperti tertib hukum, rasionalitas, penghargaan terhadap sesama manusia, keadilan sosial, persamaan antar umat manusia (*al-musâwah, egalitarianisme*), dan sebagainya⁶⁶

⁶³ Khabibi Muhammad Luthfi, *Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal*, Jurnal Shahih - Vol. 1, Nomor 1, Januari – Juni 2016, h. 2

⁶⁴Zakiya Darajat, *Warisan Islam Nusantara...*, h. 78

⁶⁵ Zakiya Darajat, *Warisan Islam Nusantara...*, h. 77

⁶⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 550

Sampai di sini, sulit untuk disangkal bahwa Islam nusantara adalah gambaran agama Islam yang anti terhadap konflik apalagi aksi radikal dan terorisme. Islam dengan wajah yang memosisikan perbedaan sebagai suatu *rahmat* sangat relevan dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Sebagai suatu basis epistemologi, Islam nusantara dapat diposisikan sebagai objek formal sekaligus objek material. Objek formal ini berarti menggunakan cara pandang agama Islam yang mengakomodasi segala bentuk perbedaan dan mengutamakan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan sosio-historis Islam nusantara itu sendiri. Sedangkan dalam posisi objek material, kajian Islam nusantara dapat diperluas dengan mengklasifikasikannya sebagai Islam yang historis bukan Islam yang normatif. Jalan ini memungkinkan orang tidak berpikir secara kaku dalam memandang agama, melainkan lebih mengutamakan kebijaksanaan yang dilahirkan oleh suatu ajaran agama.

Kembali pada pendidikan kebhinekaan, kita telah menemukan istilah yang tepat untuk mengganti pendidikan multikultural yaitu pendidikan kebhinekaan yang khas Indonesia. Selanjutnya, pendidikan kebhinekaan selain merujuk pada konsepsi pendiri bangsa, Islam nusantara sekaligus dapat menguatkan epistemologi pendidikan multikultural *ala* Indonesia yaitu pendidikan kebhinekaan khususnya mereka yang menganut agama Islam. Pemahaman Islam nusantara ini tidak hanya berdampak pada penguatan toleransi semata, melainkan juga berdampak pada penguatan nalar kebangsaan, bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang kaya dengan berbagai macam perbedaan.

Untuk menginternalisasi wajah Islam di nusantara yang penuh dengan keindahan toleransi, pendidik kita perlu diperkenalkan secara konkret berbagai macam bentuk perbedaan yang ada di Indonesia, dari mulai agama, suku, budaya, Bahasa, etnis dan sebagainya. Sampai di sini kita dapat menyebut pendidikan kebhinekaan merupakan pengejawantahan atau manifestasi dari wujud pemikiran Islam nusantara.

Dari pembahasan di atas dapat dipahami bahwa pendidikan kebhinekaan yang menurut penulis sebagai bagian dari pendidikan multikulturalisme dapat menjadi solusi yang dapat ditawarkan untuk meminimalkan konflik yang terjadi di masyarakat dengan segala macam perbedaan yang diungkap sebelumnya.

Dengan kesadaran bersama masyarakat dalam merawat kebhinekaan di lingkungan masyarakat dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kedamaian, kepedulian dan tanggung jawab sosial secara bersama. Dengan demikian, pendidikan multikulturalisme dapat menjadi salah satu cara menumbuhkan kecerdasan kewargaan bagi masyarakat. Ini menjadi sangat urgen di tengah permasalahan krisis toleransi dan kepercayaan antar masyarakat, yang sering memicu perkelahian secara fisik dan yang lebih tidak terbandung adalah perang pernyataan di media sosial yang semakin mengkhawatirkan dan berpotensi memecah belah kerukunan antar masyarakat.

Menutup pembahasan pada bab ini, penulis ingin mengutip ayat yang sangat penting untuk diaplikasikan bagi segenap bangsa Indonesia dan warga dunia, yang mengajarkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keragaman yang terjadi di antara umat manusia.

Koneksi atau silaturahmi dapat membantu antar manusia dalam mendapatkan anugerah rezeki dan berbagai kenikmatan/ kebahagiaan. Dalam pandangan al-Qur'an kebahagiaan tidak hanya terbatas pada materi, akan tetapi juga pada kebahagiaan dalam ikatan persaudaraan. Dari sinilah bermula segala kebaikan yang akan di dapatkan manusia yang memiliki banyak koneksi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً قَالَتْ بَيْنَ
 قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۗ وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۗ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: *“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. 103. Dan hendaklah ada di antara kamu se-golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. 104. dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang*

keterangan yang jelas kepada mereka, mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat, 105.”Q. S. Āli ‘Imrān [3]: 103-105.

Makna etimologi *i'tishām* adalah mengandalkan sesuatu sebagai pegangan hidup supaya tidak terjatuh kepada kondisi yang buruk. *Ḥablillāh* artinya agama, kitab dan rasul Allah.⁶⁷ Ketiga komponen tersebut sebagai falsafah hidup umat muslim. Sedangkan dalam konteks berbangsa dan bernegara setiap masyarakat memiliki falsafah masing-masing. Bangsa Indonesia memiliki falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, ditambah lagi dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Kata *ummah* secara bahasa adalah kelompok yang saling terikat secara sosiologis (*al-jamā'ah al-mua'allafah*) dan adanya pemersatu (*ribāth wa wihdah*) sehingga menjadikan mereka seperti anggota-anggota badan yang berada dalam satu tubuh. Sedangkan makna *al-khair*, maksudnya *shalāh ad-dīn wa ad-dunyā* yang berarti terbaik perspektif agama dan dunia. Kata *al-ma'ruf* maknanya, suatu yang dipandang baik menurut *syara* dan nalar manusia. Sedangkan *al-munkar* merupakan makna kontradiktif dari *al-ma'ruf*.⁶⁸ Dalam konteks berbangsa di Indonesia bisa dimaknai *ummah* dalam perspektif sosiologis. Dan sebagai alat pemersatu adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Kelima Sila yang tercantum dalam Pancasila merupakan implementasi dari *shalāh ad-dīn wa ad-dunya* yang merupakan cita-cita untuk bahagia di dunia dan akhirat.

Ayat di atas mengajarkan bahwa persatuan harus dipertahankan meskipun terdapat perbedaan. Demikian agar prinsip saling memotivasi dan beraksi untuk menjadi umat dan bangsa yang progresif dapat terealisasi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang bisa mengambil pelajaran dari para umat terdahulu. Al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat para pakar menjadi penuntun hidup, agar manusia modern tidak jatuh dalam kesalahan yang sama dari umat terdahulu. Ini adalah hikmah, pelajaran yang dapat diambil oleh bangsa yang mau berpikir.

Hal ini juga diamini oleh Bonnie Rogers bahwa persatuan sangat menunjang kesuksesan tujuan bersama, persatuan harus didukung oleh

⁶⁷ Ahmad Musthafa al-Maragi, *Tafsīr al-Marāḡi...*, juz: 4, h. 15.

⁶⁸ Ahmad Musthafa al-Maragi, *Tafsīr al-Marāḡi...*, juz:4, h. 18.

kepemimpinan yang mampu mengakomodasi segala bentuk perbedaan dan kebutuhan di tengah masyarakatnya.⁶⁹

Jika tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan bersama, maka masyarakat juga harus menjalin kerja sama harmonis untuk saling memberikan bantuan dan manfaat satu sama lain. Pemimpin dapat bertindak sebagai pendidik yang akan mensosialisasikan informasi, fasilitator yang membantu menyediakan sarana dan prasarana dan mediator yang terhubung secara langsung dengan masyarakat untuk melakukan aksi dan evaluasi program kerja.⁷⁰

Konsep kecerdasan kewargaan misalnya, karena ini adalah konsep baru yang belum banyak dibahas sebelumnya, masih butuh evaluasi dan dukungan program kerja dari pemerintah dan pihak sekolah untuk aplikasinya dalam kurikulum sekolah, pada mata pelajaran yang berhubungan dengan kemasyarakatan dan negara.

⁶⁹ Bonnie Rogers, "Partnerships for Success: Identifying And Empowering Leaders To Meet Members' Needs", *Journal of Leadership Studies*, Sep 1995; 43, 9; ProQuest, h. 455.

⁷⁰ Tarmizi A Karim, *Pemberdayaan Masyarakat...*, h. 348.